



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN



**Pengadilan Agama Padang Panjang**

Jl. H. Agus Salim No.4, Guguk Malintang, Kota Padang Panjang

---

Email: [pa.padangpanjang@pta-padang.go.id](mailto:pa.padangpanjang@pta-padang.go.id)

Website: <http://pa-padangpanjang.go.id>



# VISI & MISI

Pengadilan Agama Padang Panjang

## VISI

***“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA  
PADANG PANJANG YANG AGUNG”***

## MISI

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Padang Panjang*
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Padang Panjang*
- 3. Meningkatkan kemampuan aparatur Pengadilan Agama Padang Panjang yang profesional bersih dan berwibawa.*
- 4. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Padang Panjang.*

# TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PA PADANG PANJANG TAHUN 2022



**Pembina**  
Zakiyah Ulya, S.H.I.



**Ketua**  
Agus Sopyan, S.H.I., M.H.



**Koordinator**  
Rifazul Adzmi, S.H.I.



**Koordinator**  
Ranti Rafika Dewi, S.H.



**Sekretaris**  
Rahmat Hidayat S.E, S.H.



**Penanggungjawab  
Kepaniteraan**  
Drs. Mawardi



**Penanggungjawab  
Kesekretariatan**  
Usman, S.H.



**Anggota**  
Hj. Rika Adriani, S.H.,  
S.Ag., M.A.



**Anggota**  
Nuraini Wista, S.H.



**Anggota**  
Asri, S.H.I.



**Anggota**  
Isnaini



**Anggota**  
Aldi Farido Utama, S.H.I.



# TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PA PADANG PANJANG TAHUN 2022



**Anggota**  
Wenny Oktavia, S.HI, M.H.



**Anggota**  
Salman



**Anggota**  
Annisa Dwi Nidia, S.Kom.



**Anggota**  
R.A. Fadillah Ariyani, A.Md



**Anggota**  
Alfari Maulana Reza, S.H.



**Anggota**  
Muhammad Hadiassalam,  
S.H.



**Anggota**  
Suci Fitrah Insani, A.Md



**Anggota**  
Nisa Hundani Nabila,  
A.Md.A.B



**Anggota**  
Rahmad Syadiki,  
S.H.



**Anggota**  
Muhammad Hadi,  
S.H.



**Anggota**  
Linda Elsidia, S.H.



**Anggota**  
Miftah Hurrizki



**Anggota**  
Hj. Yeni, S.H.I.

# RAPAT KOORDINASI TIM PENYUSUN

LAPORAN PELAKSANAAN  
KEGIATANTAHUN 2022



---

Rapat Tim Penyusun Laporan  
Pelaksanaan Kegiatan TA 2022 di  
Media Center Pengadilan Agama  
Padang Panjang yang melibatkan  
Pimpinan dan semua bagian di  
Pengadilan Agama Padang Panjang

---





# KATA PENGANTAR

***Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik.***

Laporan ini di buat berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2876/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022. Laporan ini menguraikan secara deskriptif Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022, yang meliputi bidang teknis yustisial, administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan, bidang pembinaan dan pengawasan, pelayanan publik yang prima, pembinaan dan pengelolaan keuangan, dukungan informasi dan regulasi 2022.

Laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama Tahun Anggaran 2022 serta sebagai bahan informasi bagi Pimpinan Mahkamah Agung RI dan pihak-pihak lain yang membutuhkan untuk dijadikan bahan evaluasi, perencanaan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang.

Kami telah berusaha menyajikan laporan secara sempurna, baik dan obyektif, namun kami sadari masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan datang.

***Demikian, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.***

Padang Panjang, 02 Januari 2023  
Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang

ZAKIYAH ULYA, S.H.I.  
NIP. 198304202006042001

---

# RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan ini merupakan wujud keterbukaan dan akuntabilitas publik atas kinerja Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022. Laporan pelaksanaan kegiatan ini juga menyajikan data-data tentang kondisi terkini Pengadilan Agama Padang Panjang berupa sarana maupun prasarana penunjang pelaksanaan tugas serta sumber daya manusia yang ada selama tahun 2022.

Dalam tahun anggaran 2022, Pengadilan Agama Padang Panjang telah menerima 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) perkara, dengan sisa perkara tahun 2022 sebanyak 4 (empat) perkara, dan diselesaikan sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) perkara, sehingga tingkat capaian penyelesaian perkara pada tahun 2022 adalah sebesar 372 Perkara dari total 376 Perkara atau sebesar 99%.

Dari total 376 perkara tahun anggaran 2022, Pengadilan Agama Padang Panjang menerima perkara melalui aplikasi E-court sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) perkara, terdiri dari perkara gugatan sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) perkara e-court dan perkara permohonan 25 (dua puluh lima) perkara e-court. Dari 246 perkara yang masuk melalui e-court, 6 perkara diselesaikan melalui elitigasi.

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.668.177.000,- (Tiga milyar enam ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan 3 (tiga) program yaitu: (1) Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI (2) Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung RI dan (3) Peningkatan manajemen Peradilan Agama.

Tiga program yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang terdiri dari dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu anggaran DIPA 005.01 (Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 005.04 (Badan Direktorat Jenderal Peradilan Agama). Hingga akhir tahun 2022, seluruh anggaran dalam DIPA 005.01 dan DIPA 005.04 dapat terealisasi dengan capaian sebagai berikut: Realisasi Anggaran DIPA 005.01 tahun 2022 sebesar Rp. 3,566,696,385 dari total anggaran sebesar Rp. 3.589.927.000 atau sebesar 99, 35% Realisasi Anggaran DIPA 005.04 tahun 2022 sebesar Rp. 76.150.000 dari total anggaran sebesar Rp. 78.250.000 atau sebesar 97, 32%

# DAFTAR ISI

HAL.

i	KATA PENGANTAR
ii	RINGKASAN EKSEKUTIF
iii	DAFTAR ISI
iv	DAFTAR GRAFIK
v	DAFTAR TABEL
1	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>
13	<b>BAB II MANAJEMEN PERKARA</b>
13	KEADAAN PERKARA
17	PENYELESAIAN PERKARA
30	AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
35	<b>BAB III SUMBER DAYA MANUASIA</b>
48	<b>BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARPRAS DAN TEKNOLOGI</b>
	<b>INFORMASI</b>
48	PENGELOLAAN KEUANGAN
56	PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
68	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
78	<b>BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK</b>
95	<b>BAB VI PENGAWASAN</b>
95	INTERNAL
101	EVALUASI
104	<b>BAB VII PENUTUP</b>
104	KESIMPULAN
105	REKOMENDASI
106	<b>LAMPIRAN</b>



# DAFTAR GRAFIK

## HAL

- 18 STATISTIK SISA PERKARA SELAMA TAHUN 2022 PADA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
- 37 SEBARAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
- 41 SEBARAN TINGKAT PENDIDIKAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
- 42 SEBARAN UMUR APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG PADA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
- 43 SEBARAN GOLONGAN/RUANG APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
- 58 STATISTIK ASET TA. 2022 PADA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

# DAFTAR TABEL

## HAL.

- 13 Matrik keadaan perkara Pengadilan Agama Padang Panjang
- 14 Perkara masuk selama tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- 15 Perkara putus selama tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- 17 Sisa perkara tahun 2021 yang diputus selama tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- 17 Rincian sisa perkara 2021 dan belum diputus selama tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- 18 Perkara yang diputus selama tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- 18 Rincian perkara yang diputus tidak tepat waktu selama tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- 19 Rasio perkara terhadap Majelis Hakim tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- 21 Rekapitulasi perkara Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding
- 21 Rekapitulasi perkara Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding
- 21 Rekapitulasi perkara Tk.I yang tidak dapat diterima di Tingkat Banding

**HAL.**

- 22 Rekap Putusan yang Diajukan Kasasi**
  - 22 Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi**
  - 22 Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi**
  - 23 Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan tidak dapat diterima di Tingkat Kasasi**
  - 23 Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi**
  - 23 Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi**
  - 24 Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK**
  - 24 Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK**
  - 25 Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan tidak dapat diterima**
- HAL.**
- 25 Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang**



- yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK
- 25 Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK
- 26 Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK
- 26 Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK
- 26 Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan tidak dapat diterima di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK
- 27 Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Bading dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK
- 27 Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Panjang yang dibatalkan di Tingkat Bading dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK
- 27 Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Pajang yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan di tingkat PK
- 28 Rekapitulasi putusan PTA.Padang yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan di tingkat PK
- HAL. 28 Rekapitulasi putusan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan di tingkat PK

- 28 Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dibatalkan di tingkat PK
- 29 Rekapitulasi putusan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dibatalkan di tingkat PK
- 29 Rekapitulasi putusan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dibatalkan di tingkat PK
- 29 Rekapitulasi putusan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap dan tidak dapat diterima di tingkat PK
- 30 Rekapitulasi putusan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dan tidak dapat diterima di tingkat PK
- 30 Jumlah mediasi berhasil di Pengadilan Agama Padang Panjang selama tahun 2022
- 31 Realisasi Sidang Posbakum di Pengadilan Agama Padang Panjang
- 33 Realisasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Padang Panjang
- 34 Realisasi Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Padang Panjang
- 36 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- 37 Tenaga Hakim pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- 37 Tenaga Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- 37 Tenaga Kejurusitaan pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- HAL. 38 Tenaga Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Padang

## Panjang

- 38 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
- 43 Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang yang Mutasi masuk dan Keluar
- 49 Alokasi anggaran per-program pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- 50 Alokasi anggaran per-jenis belanja pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- 50 Realisasi belanja pegawai TA 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- 50 Realisasi belanja barang (005.01) TA. 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- 51 Realisasi belanja barang (005.04) TA. 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- 51 Realisasi belanja modal TA. 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- 51 Realisasi PNBP DIPA 01 TA. 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- 52 Realisasi PNBP DIPA 04 TA. 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- 54 Penghargaan yang didapatkan atas pengelolaan keuangan pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- 56 Data golongan dan nilai aset yang di kelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2022

HAL.



- 58 Nilai Peralatandan Mesin yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2021 dan TA. 2022
- 59 Kondisi kendaraan dinas yang di kelola oleh Pengadilan Agama Padang PanjangTA. 2022
- 59 Nilai gedung dan bangunan yang di kelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2021 dan TA. 2022
- 60 Kondisi rumah dinas yang di kelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2022
- 60 Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang di kelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2021 dan TA. 2022
- 61 Nilai aset tetap lainnya yang di kelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2021 dan TA. 2022
- 61 Nilai asset tak berwujud yang di kelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2021 dan TA. 2022
- 62 Pembangunan gedung kantor lanjutan pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- 62 Renovasi, rehabilitasi dan restorasi gedung kantor pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- 62 Pembangunan, renovasi dan rehabilitasi rumah Negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- 63 Sarana dan prasarana lingkungan peradilan pada lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang
- 63 Pengadaan peralatan dan mesin pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- 63 Pengadaan kendaraan dinas pada lingkungan Pengadilan

**HAL.**

**Agama Padang Panjang**

- 64 Rekapitulasi penerimaan hibah langsung bentuk uang tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang**
- 64 Rekapitulasi penerimaan hibah langsung bentuk barang tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang**
- 65 BMN yang dialihfungsikan TA. 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang**
- 66 Penghapusan BMN TA. 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang**
- 66 Penghargaan yang di terima dalam pengelolaan BMN sampai tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang**
- 67 Matirks sarana/ prasarana tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang**
- 69 Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi pada Pengadilan Padang Panjang**
- 75 Rekapitulasi penerimaan dan penanganan perkara *E-Court***



# BAB I PENDAHULUAN

Pengadilan Agama Padang Panjang dibentuk berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di Luar Jawa dan Madura.

Pengadilan Agama Padang Panjang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Padang Panjang terletak di Jalan H. Agus Salim, No. 04, Kota Padang Panjang. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang yang berkedudukan di Jalan H. Agus Salim, No. 04, Kota Padang Panjang ini, meliputi 2 (dua) Kecamatan di Kota Padang Panjang dan 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar.

Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Agama Padang Panjang kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Mahkamah Agung RI untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran peradilan lainnya serta masyarakat, sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas publik.

Tahun 2004 menjadi tonggak baru sejarah peradilan di Indonesia, seluruh badan peradilan dihimpun di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri ini semakin nyata dengan disahkannya beberapa undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut kewenangan mengadili bagi



Peradilan Agama menjadi sebagai berikut:

- |               |          |                     |
|---------------|----------|---------------------|
| 1. Perkawinan | 4. Hibah | 7. Infaq            |
| 2. Waris      | 5. Wakaf | 8. Shadaqah         |
| 3. Wasiat     | 6. Zakat | 9. Ekonomi Syari'ah |

Perubahan kewenangan tersebut harus disikapi dengan kesiapan sumber daya manusia Pengadilan Agama Padang Panjang. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi derasnya laju perkembangan zaman dimana para pelaku bisnis syari'ah semakin berkembang luas sehingga perlu adanya perangkat yang mengadilinya apabila terdapat sengketa dalam masalah Ekonomi Syari'ah.

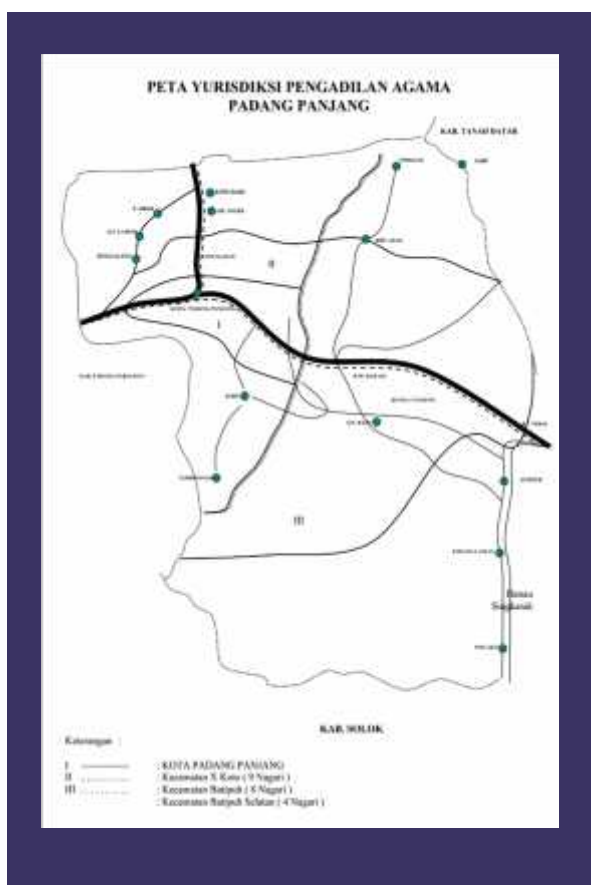
## A. KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Agenda pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimulai dengan ditetapkan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung pada tahun 2003. Mahkamah Agung menyongsong visi untuk mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efisien, efektif serta mendapat kepercayaan publik, profesional dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya ringan bagi masyarakat serta mampu melakukan pembaruan pelayanan publik. Proses pembaruan peradilan terus diupayakan dengan upaya penyusunan Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010 - 2035 yang memuat perencanaan jangka panjang untuk 25 (dua puluh lima tahun) yang dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mewujudkan cita-cita "***Badan Peradilan Indonesia yang Agung***".

Program transparansi dan penegakan keadilan pada dunia Peradilan menjadi salah satu isu sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang menghendaki prinsip akuntabilitas dan transparansi peradilan guna mendukung independensi peradilan. Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya yang menjadi pilot project reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2007 telah berhasil melakukan

perubahan besar pada kinerja Peradilan Agama, mulai dari mutu pelayanan, transparansi, tanggung jawab, maupun kedisiplinan pegawai.

Selama tahun 2022, Pengadilan Agama Padang Panjang telah melakukan beberapa upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui berbagai *platform* media sosial, website, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), *banner*, poster, pamflet, brosur, dan lain-lain. Selain itu, dalam hal pelaksanaan administrasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan persidangan sudah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur), menerapkan one day minute dan one day publish, meningkatkan akses terhadap keadilan untuk semua (*Justice for All*) melalui program pembebasan biaya perkara (fasilitas prodeo DIPA), untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi masyarakat.



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pengadilan, khususnya pelayanan terhadap pencari keadilan, Pengadilan Agama Padang Panjang mewilayahi 5 kecamatan yang menjadi yurisdiksinya, antara lain:

#### 2 KECAMATAN BERADA DI KOTA PADANG PANJANG

- Kecamatan Padang Panjang Barat
- Kecamatan Padang Panjang Timur

#### 3 KECAMATAN DI DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

- Kecamatan X Koto
- Kecamatan Batipuh
- Kecamatan Batipuh Selatan

Pengadilan Agama Padang Panjang mempersiapkan diri dengan berbagai kegiatan seperti meningkatkan kualitas SDM yang ada antara lain mengikuti berbagai seminar tentang Ekonomi Syari'ah, diskusi tentang ekonomi syari'ah, pelatihan-pelatihan serta berbagai kegiatan lainnya baik di bidang kepaniteraan maupun di bidang kesekretariatan yang kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta wawasan ilmu pengetahuan bagi aparat Peradilan Agama.

## B. VISI DAN MISI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Visi Pengadilan Agama Padang Panjang mengacu kepada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu:

### VISI

***“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG YANG AGUNG”***

#### Penjelasan

- Pengadilan Agama menunjukkan Salah satu Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung;
- Padang Panjang, menunjukkan lokasi keberadaan;
- Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Dari visi Pengadilan Agama Padang Panjang diatas, dapat kita ketahui bahwasanya idiologi dasar dari Pengadilan Agama Padang Panjang sesuai dengan



pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan:

**“ KEKUASAAN KEHAKIMAN DI LINGKUNGAN  
PERADILAN AGAMA DILAKSANAKAN OLEH  
PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN TINGGI  
AGAMA ” .**

Sedangkan dimasa depan Pengadilan Agama Padang Panjang ingin menjadi sebuah peradilan yang terhormat, besar, mulia dan luhur. Melalui visi ini, Pengadilan Agama Padang Panjang ingin menjadi sebuah instansi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Padang Panjang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Padang Panjang
3. Meningkatkan kemampuan aparatur Pengadilan Agama Padang Panjang yang profesional bersih dan berwibawa.
4. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Padang Panjang.

## C. TUJUAN DAN RENCANA STRATEGIS

### TUJUAN

Tujuan adalah hasil yang diinginkan oleh seseorang atau organisasi. Tujuan dapat dijadikan alat yang efektif untuk memastikan bahwasanya setiap anggota organisasi sadar akan apa yang harus dilakukannya untuk mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi. Tujuan dapat berbentuk tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

Pengadilan Agama Padang Panjang, dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, telah merumuskan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam tahun 2020-2024. Tujuan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.*
- 2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.*
- 3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.*
- 4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan jaminan proses peradilan yang adil.*

### RENCANA STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran ini akan dievaluasi setiap tahunnya untuk

mengukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi. sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut:

## **1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Agama Padang Panjang menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Padang Panjang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut di atas, antara lain:

- a. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu;
- b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
- c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
- d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

## **2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Untuk mendorong efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Padang Panjang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, antara lain:

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;

### **3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut:

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
- c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

### **4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;**

Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil berupa persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

## **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Pengadilan Agama Padang Panjang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pasal 9 menyatakan: Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera/ Sekretaris dan Jurusita Pengganti. Selanjutnya Pimpinan Pengadilan terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua (Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989).

Berdasarkan pasal 26 dinyatakan:

1. Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang didampingi oleh seorang Panitera.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita Pengganti.



Pada bidang kesekretariatan yang sebelumnya masih menggunakan nomenklatur lama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 303 tahun 1990, namun struktur organisasi Pengadilan Agama tersebut telah diubah melalui PERMA No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dengan susunan organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jusrita/ Jusrita Pengganti. Untuk jabatan Wakil Panitera berdasarkan PERMA No 5 Tahun 2018 tidak ada lagi, namun jenjang karir, kepangkatan, pensiun dan penggajian serta meninggal dunia sampai dengan masa tenggang 5 (lima tahun) ke depan tetap berlaku sebagai Wakil Panitera tanpa ada pengisian maupun penggantian jabatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut:



# STRUKTUR ORGANISASI

## PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

**ZAKIYAH ULYA, S.H.I.**  
Ketua

**AGUS SOPYAN, S.H.I., M.H.**  
Wakil Ketua

**RIFAZUL ADZMI, S.H.I.**  
Hakim

**RANTI RAFIKA DEWI, S.H.**  
Hakim

**Drs. MAWARDI**  
Panitera

**USMAN, S.H.**  
Sekretaris

**Hj. RIKA ADRIANI, S.H, S.Ag, M.A**  
Panmud Hukum

**NURAINI WISTA, S.H.**  
Panmud Gugatan

**ASRI, S.H.I.**  
Panmud Permohonan

**FAHMAT HIDAYAT, S.E, S.H.**  
Kasubbag PTIP

**ISNAINI**  
Kasubbag Kepegawaian & Ortala

**ALDI FARIDO UTAMA, S.H.I.**  
Kasubbag Umum & Keuangan

**#LFARIZ MAULANA REZA, S.H.**  
Analisis Perkara Peradilan

**MUHAMMAD HADIASSALAM, S.H**  
Analisis Perkara Peradilan

**SUCI FITRAH INSANI, A.Md**  
Pengelola Perkara

**NSA HUNDANI NABILA, A.Md.A.B.**  
Pengelola Perkara

**WENNY OKTAVIA, S.H.I., MH.**  
Panitera Pengganti

**HARIZUL WATANI**  
Panitera Pengganti

**ANNISA DWI NIDIA, S.Kom.**  
Pranata Komputer Ahli Pertama

**RA. FADILLAH ARIYANI, A.Md.**  
Pelaksana Arsiparis

**SALMAN**  
Jurisita Pengganti

Dari Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Panjang di atas, Pengadilan Agama Padang Panjang menyusun Tupoksi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- Perkawinan
- Waris
- Wasiat
- Hibah
- Wakaf
- Zakat
- Infaq
- Shadaqah, dan
- Ekonomi Syari'ah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (judicial power) yakni menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.
2. Fungsi pembinaan yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama Padang Panjang baik menyangkut teknis yustisial, administrasi perkara maupun administrasi umum perlengkapan, pembangunan, keuangan dan kepegawaian.
3. Fungsi administrasi yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan administrasi perkara untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok.
4. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dengan membentuk Hakim Pengawas Bidang dan mengadakan pengawasan terhadap tingkah laku pejabat fungsional dan struktural yaitu Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Kasubbag dan Jurusita Pengganti.

5. Fungsi nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang.



# BAB II

# MANAJEMEN PERKARA

## A. KEADAAN PERKARA

Berdasarkan SIPP Pengadilan Agama Padang Panjang tanggal 30 Desember 2022 telah terdaftar sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam ) perkara, dengan rincian 340 perkara Gugatan dan 36 perkara Permohonan. Ditambah dengan perkara sisa tahun 2021 sebanyak 4 (empat) perkara sehingga keseluruhan perkara berjumlah 380 (Tiga ratus delapan puluh) perkara. Adapun penyelesaian Perkara yang diselesaikan tahun 2022 sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) perkara, dengan rincian 340 perkara Gugatan dan 36 perkara Permohonan. Dengan demikian terdapat sisa perkara di akhir tahun 2022 sebanyak 4 (empat) perkara Gugatan. Sehingga secara keseluruhan penyelesaian perkara tahun 2022 mencapai 98.95% dengan sisa 1.05%.

No	Nama	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1	2		3	4	5	6
1.	Izin Poligami	-	1	1	-	
2.	Penguasaan Anak	-	1	1	-	
4.	Harta Bersama		1	1	-	
5.	Cerai Talak	1	84	84	-	
6.	Cerai Gugat	3	247	247	4	
7.	Its bath nikah contensius		5	5		
8.	Perwalian	-	2	2		
9.	Lain-lain	-	2	2	-	
10.	Isbat Nikah	-	22	22	-	
11.	Dispensasi Kawin	-	7	7	-	
12.	Wali Adhal	-	2	2	-	
13.	Penetapan Ahli Waris	-	1	1	-	
14.	Asal Usul Anak		1	1		
15.	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>4</b>	

**Tabel 2-1:** Matrik keadaan perkara Pengadilan Agama Padang Panjang



Secara rinci perkara masuk tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang, dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	JENIS PERKARA	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Izin Poligami	1	
2.	Pencegahan Perkawinan	0	
3.	Penolakan Perkara oleh PPN	0	
4.	Pembatalan Perkawinan	0	
5.	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri	0	
6.	Cerai Talak	84	
7.	Cerai Gugat	247	
8.	Harta Bersama	1	
9.	Penguasaan Anak	1	
10.	Nafkah Anak Oleh Ibu	0	
11.	Hak Bekas Isteri	0	
12.	Pengesahan Anak	0	
13.	Pencabutan Kek. Orang Tua	0	
14.	Perwalian	2	
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	
16.	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	
18.	Asal Usul Anak	1	
19.	Pen. Kawin Campuran	0	
20.	Isbat Nikah	27	
21.	Izin Kawin	0	
22.	Dispensasi Kawin	7	
23.	Wali Adhol	2	
24.	Ekonomi Syariah	0	
25.	Kewarisan	0	
26.	Wasiat	0	
27.	Hibah	0	
28.	Waqaf	0	
29.	Zakat/Infaq/Shadaqoh	0	
30.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	1	
31.	Lain-Lain	2	
	<b>Jumlah</b>	<b>376</b>	

**Tabel 2-2:** Perkara masuk selama tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Adapun perkara yang putus, minutasi dan dipublish pada Direktori Putusan pada hari yang sama pada saat tanggal putus selama tahun 2022, secara rinci dapat dilihat pada

tabel berikut:

NO	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN 2022	
		Jumlah	Keterangan
<b>A</b>	<b>Dikabulkan</b>		
1.	Izin Poligami	1	
2.	Pencegahan Perkawinan	0	
3.	Penolakan Perkara oleh PPN	0	
4.	Pembatalan Perkawinan	0	
5.	Kelalaian Atas Kewajiban Sm/Istri	0	
6.	Cerai Talak	84	
7.	Cerai Gugat	247	
8.	Harta Bersama	1	
9.	Penguasaan Anak	1	
10.	Nafkah Anak Oleh Ibu	0	
11.	Hak Bekas Isteri	0	
12.	Pengesahan Anak	0	
13.	Pencabutan Kek. Orang Tua	0	
14.	Perwalian	2	
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	1	
16.	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	
18.	Asal Usul Anak	0	
19.	Pen. Kawin Campuran	0	
20.	Isbat Nikah	27	
21.	Izin Kawin	0	
22.	Dispensasi Kawin	7	
23.	Wali Adhol	2	
24.	Ekonomi Syariah	0	
25.	Kewarisan	0	
26.	Wasiat	0	
27.	Hibah	0	
28.	Waqaf	0	
29.	Zakat/Infaq/Shadaqoh	0	
30.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	1	
31.	Lain-Lain	2	
<b>B</b>	<b>DICABUT</b>	18	
<b>C</b>	<b>DITOLAK</b>	3	
<b>D</b>	<b>TIDAK DITERIMA</b>	0	
<b>E</b>	<b>GUGUR</b>	1	
<b>F</b>	<b>DICORET DARI REGISTER</b>	2	
	<b>Jumlah</b>	<b>376</b>	

Tabel 2-3: Perkara putus selama tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

# 4

Perkara **Sisa** dari Tahun 2021

# 376

Perkara **diterima** Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2022, menurun 0,9% dibanding tahun 2022 yang berjumlah 383 perkara

## 340

PERKARA GUGATAN

## 36

PERKARA PERMOHONAN

# 376

Perkara berhasil **diputus tepat waktu** di Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2022, dengan sisa 4 perkara Gugatan

## 340

PERKARA GUGATAN

## 36

PERKARA PERMOHONAN

## B. PENYELESAIAN PERKARA

### 1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus

Sisa perkara tahun 2021 pada Pengadilan Agama Padang Panjang sebanyak 4 (empat) perkara.

No	Sisa tahun 2022	Putus	Belum Putus	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	4	-	-	

**Tabel 2-4:** Sisa perkara tahun 2021 yang diputus selama tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

No	Nomor Perkara	Putus	Belum Putus	Keterangan
1	2	3	4	5
1	333 Pdt.G/2021/PA-PP	-	√	
2	334 Pdt.G/2021/PA-PP	-	√	
3	335 Pdt.G/2021/PA-PP	-	√	
4	336/Pdt.G/2021/PA-PP	-	√	
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	

**Tabel 2-5:** Rincian sisa perkara 2021 dan belum diputus pada tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

### 2. Jumlah Perkara yang Putus Tepat Waktu

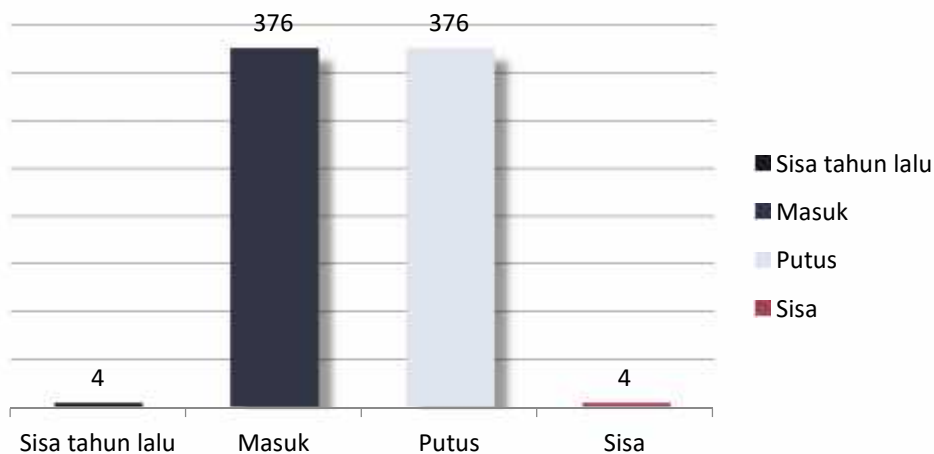
Jumlah perkara yang diputus meliputi sisa perkara pada tahun 2021 kemudian ditambah penerimaan pada tahun 2022. Untuk sisa perkara tahun 2021 sebanyak 4 (empat) perkara, dan untuk perkara tahun 2022 telah diterima 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) perkara, dan diputus sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) perkara, dengan keadaan sebagai berikut :

- Dikabulkan : 352 perkara
- Dicabut : 18 perkara
- Ditolak : 3 perkara
- Tidak diterima : 2 perkara

- Gugur	:	1 perkara
- NO	:	- perkara
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>376 perkara</b>

Dengan demikian terdapat sisa perkara di akhir tahun 2022 sebanyak 4 perkara (1.06%). Berikut statistik Perkara Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022:

### Sisa Perkara Pengadilan Agama Padang Panjang



**Grafik 2-1:** Statistik sisa perkara selama tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Dari 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) perkara yang diputus, diputus tepat waktu sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) perkara. Dengan demikian semua perkara yang diputus bisa diselesaikan tepat waktu.

No	Perkara Putus	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5
	376	376	0	

**Tabel 2-6:** Perkara yang diputus selama tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

No	Nomor Perkara	Sebab Putus Tidak Tepat Waktu
1	2	3
	-	-

**Tabel 2-7:** Rincian perkara yang diputus tidak tepat waktu selama tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.



## 2.1 Rasio Perkara Terhadap Majelis

Jumlah Perkara masuk pada Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2022 sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) perkara ditambah sisa tahun 2021 sebanyak 4 (empat) perkara. Diputus oleh Pengadilan Agama Padang Panjang sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) perkara, sehingga terdapat sisa perkara di akhir tahun 2022 sebanyak 4 (empat) perkara. Pada Tahun 2022 Pengadilan Agama Padang Panjang mempunyai 4 (empat) orang Hakim, terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua dan 2 orang Hakim. Dalam menyelesaikan 376 perkara selama Tahun 2022, Pengadilan Agama Padang Panjang dalam Court Calender 2022 menetapkan 2 Majelis Hakim dan 2 Hakim Tunggal. Dengan demikian rincian rasio perkara terhadap Majelis Hakim/ Hakim Tunggal sebagai berikut:

Bulan	Perkara Perdata		Jumlah Hakim	Jumlah Majelis Hakim/ Hakim Tunggal	Rasio perkara masuk terhadap majelis/ Hakim Tunggal	Rasio perkara putus terhadap majelis
	Masuk	Putus				
<b>1</b>	2	3	4	5	6=(2:5)	7=(3:5)
Januari	40	22	4	3	13.3	7.3
Februari	36	26	4	2	18	13
Maret	29	41	4	2	14.5	20.5
April	16	16	4	3	5.3	5.3
Mei	31	21	4	4	7.75	5.25
Juni	49	49	4	4	12.25	12.25
Juli	44	37	4	3	14.7	12.3
Agustus	39	45	4	3	13	15
September	29	32	4	4	7.25	8
Oktober	29	29	4	4	7.25	7.25
November	17	34	4	4	4.25	8.5
Desember	17	24	4	3	5.7	8
<b>Jumlah</b>	<b>376</b>	<b>376</b>			<b>172.25</b>	<b>123,10</b>

**Tabel 2-8:** Rasio perkara terhadap Majelis Hakim/ Hakim Tunggal Tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

## PERKARA DIPUTUS BERDASARKAN JENIS PERKARA

### PERKARA PERMOHONAN

27 *Itsbat Nikah*

7 *Dispensasi Kawin*

2 *Wali Adhol*

1 *Penetapan Ahli Waris*

2 *Wali Adhol*

2 *Perwalian*

1 *Asal-Usul Anak*

### PERKARA GUGATAN

247 *Cerai Gugat*

84 *Cerai Talak*

1 *Penguasaan Anak*

1 *Harta Bersama*

2 *Lain-lain*

### 3. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

#### 3.1 Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara pada Pengadilan Agama Padang Panjang yang tidak mengajukan banding pada tahun 2022 sejumlah 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) perkara yang diputus selama tahun 2022 atau sebesar 100%.

##### a. Putusan Perkara Tk. I yang dikuatkan Tk Banding

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tk banding, perkara tersebut sebagai berikut:

No	Nomor Perkara Tk. Pertama	No. Perkara TK. Banding	Ket
1	2	3	4
1.	-	-	-

**Tabel 2-9:** Rekapitulasi perkara Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding

##### b. Putusan Perkara Tk.I yang dibatalkan Tk Banding

Rincian Putusan Perkara Tk.I yang dibatalkan di Tk Banding:

No	NomorPerkara Tk. Pertama	No. Perkara TK. Banding	Ket
1	2	3	4
	-	-	-

**Tabel 2-10:** Rekapitulasi perkara Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding

##### c. Putusan Perkara Tk. I yang tidak dapat diterima Tk Banding

Putusan perkara Pengadilan Agama Padang Panjang yang tidak dapat diterima pada tingkat banding pada tahun 2022 tidak ada.

No	NomorPerkara Tk. I	No. perkara TK. Banding	Keterangan
1	2	3	4
	-	-	

**Tabel 2-11:** Rekapitulasi perkara Tk.I yang tidak dapat diterima di Tingkat Banding

### 3.2 Putusan yang tidak diajukan Kasasi

Perkara pada Pengadilan Agama Padang Panjang yang tidak diajukan kasasi pada tahun 2022 sejumlah 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) perkara yang diputus selama tahun 2022 atau sebesar 100%.

Rincian Putusan yang diajukan Kasasi:

No	NomorPerkara Tk. I	Nomor perkara TK. Banding	Nomor perkara TK. Kasasi	Keterangan
1	2	3	4	5
	-	-	-	-

Tabel 2-12: Rekap Putusan yang Diajukan Kasasi

#### a. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi

Rincian Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi sebagai berikut:

No	NomorPerkara Tk. I	No. perkara TK. Banding	No. perkara TK. Kasasi	Ket
1	2	3	4	5
	-	-	-	

Tabel 2-13: Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi

#### b. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi

Rincian putusan Tk. Banding yang dibatalkan pada Tk. Kasasi sebagai berikut:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. perkara TK. Banding	No. perkara TK. Kasasi	Ket
1	2	3	4	5
	-	-	-	

Tabel 2-14: Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi

**c. Putusan pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk banding dan tidak dapat diterima di Tk. Kasasi**

Rincian putusan pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk banding dan tidak dapat diterima di Tk. Kasasi sebagai berikut:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. perkara TK. Banding	No. perkara TK. Kasasi	Ket
1	2	3	4	5
	-	-	-	

**Tabel 2-15:** Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan tidak dapat diterima di Tingkat Kasasi

**d. Putusan pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi**

Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022 yang dibatalkan di Tk. Banding hingga saat ini sebagai berikut:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. perkara TK. Banding	No. perkara TK. Kasasi	Ket
1	2	3	4	5
	-	-	-	

**Tabel 2-16:** Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi

**e. Putusan pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi**

Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022 yang dibatalkan Tk. Banding sebagai berikut:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. perkara TK. Banding	No. perkara TK. Kasasi	Ket
1	2	3	4	5
	-	-	-	

**Tabel 2-17:** Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi

**3.3 Putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)**

Perkara pada Pengadilan Agama Padang Panjang yang tidak diajukan



Peninjauan Kembali pada tahun 2022 sejumlah 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) perkara yang diputus selama tahun 2022 atau sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut:

**a. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK**

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022 yang dikuatkan di Tk. Banding, dikuatkan di Tk. Kasasi dan dikuatkan di Tk. PK:

No	NomorPerkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

**Tabel 2-18:** Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK

**b. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK**

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022 yang dikuatkan di Tk. Banding, dibatalkan di Tk. Kasasi dan dikuatkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

**Tabel 2-19:** Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding, dibatalkan di Tingkat Kasasi dan dikuatkan di tingkat PK

**c. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk. banding dan tidak dapat diterima di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK**

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022 yang dikuatkan Tk. Banding, tidak dapat diterima di Tk. Kasasi dan dikuatkan Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

**Tabel 2-20:** Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding, tidak dapat diterima di Tingkat Kasasi dan dikuatkan di tingkat PK

**d. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK**

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022 yang dikuatkan di Tk. Banding, dikuatkan di Tk. Kasasi dan dikuatkan di Tk.

PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

**Tabel 2-21:** Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding, dikuatkan di Tingkat Kasasi dan dikuatkan di tingkat PK.

**e. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK**

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022 yang dibatalkan di Tk. Banding, dibatalkan di Tk. Kasasi dan dikuatkan di Tk.

PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

**Tabel 2-22:** Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding, dibatalkan di Tingkat Kasasi dan dikuatkan di tingkat PK

**f. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dandikuatkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK**

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022 yang

dibatalkan di Tk. Banding, dibatalkan di Tk. Kasasi dan dikuatkan di Tk.

PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

**Tabel 2-23:** Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding, dikuatkan di Tingkat Kasasi dan dibatalkan di tingkat PK

**g. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK**

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022 yang dikuatkan di Tk. Banding, dibatalkan di Tk. Kasasi dan dibatalkan di Tk.

PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

**Tabel 2-24:** Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding, dibatalkan di Tingkat Kasasi dan dibatalkan di tingkat PK

**h. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk. banding dan tidak dapat diterima di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK**

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022 yang dikuatkan di Tk. Banding, tidak dapat diterima di Tk. Kasasi dan dibatalkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

**Tabel 2-25:** Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding, tidak dapat diterima di Tingkat Kasasi dan dibatalkan di tingkat PK

**i. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK**

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022 yang dibatalkan di Tk. Banding, dikuatkan di Tk. Kasasi dan dibatalkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	

**Tabel 2-26:** Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat , dikuatkan di Tingkat Kasasi dan dibatalkan di tingkat PK

**j. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk PK.**

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022 yang dibatalkan di Tk. Banding, dibatalkan di Tk. Kasasi dan dibatalkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

**Tabel 2-27 :** Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Panjang yang dibatalkan di Tingkat Bading, dibatalkan di Tingkat Kasasi dan dibatalkan di tingkat PK

**k. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan di tingkat PK**

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022 yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan di tingkat PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

**Tabel 2-28 :** Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Pajang yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan di tingkat PK

**I. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan di tingkat PK**

Rincian putusan PTA. Padang yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan tingkat PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

**Tabel 2-29** : Rekapitulasi putusan PTA.Padang yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan di tingkat PK

**m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan di tingkat PK**

Rincian Putusan pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan tingkat PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

**Tabel 2-30** : Rekapitulasi putusan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan di tingkat PK

**n. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan di tingkat PK**

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022 yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan tingkat PK :

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

**Tabel 2-31** : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dibatalkan di tingkat PK

**o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang Batalkan di tingkat PK**

Rincian Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan tingkat PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

**Tabel 2-32:** Rekapitulasi putusan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dibatalkan di tingkat PK

**p. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan di tingkat PK**

Rincian Putusan pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan di tingkat PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

**Tabel 2-33 :** Rekapitulasi putusan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dibatalkan di tingkat PK

**q. Putusan Pengadilan Tk. pertama yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima di Tk. PK**

Rincian Putusan pengadilan Tk. pertama yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

**Tabel 2-34 :** Rekapitulasi putusan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap dan tidak dapat diterima di tingkat PK

**r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima di Tk. PK**

Rincian Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima di Tk. PK:



No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

**Tabel 2-35 :** Rekapitulasi putusan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dan tidak dapat diterima di tingkat PK

#### 4. Perkara Perdata Yang Berhasil Melalui Mediasi

Selama tahun 2022, Pengadilan Agama Padang Panjang telah melakukan mediasi perkara sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) perkara, dan yang berhasil di mediasi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) perkara atau sebesar 8,52 %. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi ini dikarenakan masing-masing pihak yang berperkara sudah sama-sama mempunyai tekad yang kuat sebelum mengajukan perkara ke Pengadilan Agama sehingga nasehat dan solusi yang diberikan oleh mediator tidak mampu menyentuh hati mereka untuk menyelesaikan perkara secara damai.

No	Jumlah Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Keterangan
1	2	3	4	5
	340	29	77	

**Tabel 2-36:** Jumlah mediasi berhasil di Pengadilan Agama Padang Panjang selama tahun 2022.

#### 5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi tidak ada karena bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Padang Panjang.

### C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Padang Panjang telah melaksanakan penilaian akreditasi penjaminan mutu dan mendapatkan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama pada tanggal 1 Maret 2019 dengan nilai "A" (Excellent). Selanjutnya pada tahun 2020 telah

dilakukan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu dan Pengadilan Agama Padang Panjang berhasil mempertahankan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai “A” (Excellent).

## 1. Posbakum

Pos Bantuan Hukum dilaksanakan dalam rangka memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan.

Pengadaan Posbakum di Pengadilan Agama Padang Panjang dilaksanakan melalui sistem pengadaan langsung dengan mekanisme tertentu, pengadaan Posbakum dilaksanakan pada akhir tahun 2021 dan dimenangkan oleh LKBH Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi yang dimulai pada awal tahun anggaran 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, yang dibiayai oleh DIPA-005.04.2.401963/2022 dengan Pagu sebesar Rp. 31.350.000,-.

Selama tahun 2022 untuk realisasi pelaksanaan Posbakum tahun 2022 dengan Pagu sebesar Rp. 31.350.000 (Tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah direalisasikan 100% dan dengan target jumlah orang yang dilayani sebanyak 300 orang telah mencapai target sebanyak 100% yaitu 300 orang.

No	Anggaran	Target Layanan Posbakum	Realisasi Anggaran	Jumlah Layanan Posbakum
1	2	3	4	5
1	Rp.31.350.000,-	300 (orang)	Rp.31,350.000,-	300 (orang)

**Tabel 2.38** :Realisasi Posbakum di Pengadilan Agama Padang Panjang

## 2. Sidang Keliling

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mencanangkan program peningkatan manajemen badan peradilan agama yaitu dengan terselenggaranya penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan (Sidang keliling).

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Adapun petunjuk teknis sidang keliling di Peradilan Agama diatur dalam BAB IV Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pelaksanaan Sidang di luar gedung pengadilan di Pengadilan Agama Padang Panjang TA 2022 dilakukan di dua Kecamatan, masing-masing Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh dan Kecamatan Batipuh Selatan,



Kabupaten Tanah Datar dengan terlebih dahulu melakukan survey dan kerjasama dengan kantor KUA Kecamatan serta Wali Nagari setempat.

Selama tahun 2022, Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam DIPA untuk melaksanakan sidang keliling sebanyak 10 (tujuh) kegiatan dan telah direalisasikan sebesar Rp. 31.350.000,- (tiga puluh stu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelaksanaan sidang keliling 10 kegiatan dengan perkara yang diselesaikan sebanyak 19 perkara.

No	Anggaran	Volume sidang keliling dalam DIPA	Realisasi Anggaran	Jumlah perkara sidang keliling yang telah dilaksanakan
1	2	3	4	5
1	Rp.31.500.000,-	10 ( kegiatan)	Rp.31,350.000,-	10 (kegiatan) 19 Perkara

**Tabel 2-39:** Realisasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Padang Panjang

### 3. Perkara Prodeo

Selain program penyelesaian perkara di Luar gedung, program lainnya yang menjadi program unggulan Mahkamah Agung RI adalah pembebasan biaya perkara.

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung. Adapun petunjuk teknis dari perkara prodeo ini, terdapat dalam Perma nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

#### **Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo:**

Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
3. Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.
4. Ketidakmampuan anggota masyarakat secara ekonomi dapat juga diakses melalui portal Basis Data Terpadu TN2PK pada aplikasi Simtalak Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

#### **Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama:**

1. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang dengan melampirkan data pendukung.
2. Petugas PTSP memeriksa identitas Pemohon dalam aplikasi SIMTALAK yang terkoneksi dengan Basis Data Terpadu Kemiskinan.
3. Apabila Pemohon termasuk dalam kategori penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan, maka permohonan Pemohon diproses untuk selanjutnya diterbitkan :
  - Surat Pertimbangan dari Panitera.
  - Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang tentang dikabulkannya Pemohon untuk berperkara secara prodeo.
  - Surat Keputusan dari Kuasa Pengguna Anggaran tentang perintah pencairan dana dari DIPA Pengadilan Agama Padang Panjang.
4. Dalam hal Pemohon tidak termasuk penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan, Pemohon dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo murni.

Selama tahun 2022, Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dalam DIPA untuk 40 perkara prodeo dan telah direalisasikan sebanyak Rp. 13.450.000,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 40 perkara prodeo. Karena banyaknya kebutuhan masyarakat akan pengajuan perkara secara prodeo sehingga perkara prodeo di Pengadilan Agama Padang Panjang telah mencapai target perkara sesuai target TA 2022,

No	Anggaran	Volume Perkara Prodeo dalam DIPA	Realisasi Anggaran	Jumlah Perkara Prodeo yang telah diputuskan
1	2	3	4	5
1	Rp. 15.400.000	40 Perkara	Rp. 13.450.000	40 perkara

**Tabel 2-40:** Realisasi Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Padang Panjang



# BAB III

## SUMBER DAYA MANUSIA

### A. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada awal tahun 2022 pegawai Pengadilan Agama Padang Panjang berjumlah 20 orang. Pada bulan April tahun 2022 Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan tambahan 4 orang CPNS formasi 2022, yaitu CPNS Analis Perkara Peradilan 2 Orang dan CPNS Pengelola Perkara 2 Orang.

Pada Tahun 2022 Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Padang Panjang yang mutasi keluar maupun masuk sebagai berikut:

No	Tanggal	Nama	Jabatan	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar
1	28 Juli 2022	Dewita Irma Sari, S.H.I.	Panmud Permohonan	-	PA Solok
2	29 Juli 2022	Suherman, S.H.	Panmud Permohonan	-	PA Batusangkar
3	29 Juli 2022	Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.	Panmud Hukum	PA Padang Panjang	-
4	29 Juli 2022	Rini Anggawati, S.H.	Panmud Hukum	-	PA Labuk Basung
5	29 Juli 2022	Murti Dewi, S.H.I.	Panitera Pengganti	-	PA Tanjung Pati
6	12 September 2022	Zakiah Ulya, S.H.I.	Ketua	PA Padang Panjang	-
7	16 September 2022	Ariefarahmy, S.H.I., M.A.	Wakil Ketua		PA Pariaman

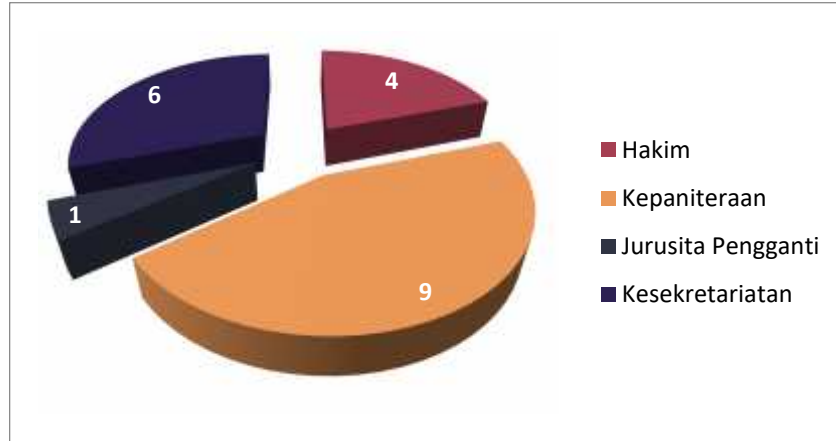
Tabel 3-1. Mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Pada Tahun 2022, Pegawai Pengadilan Agama Padang Panjang yang telah mengajukan Pensiun Dini adalah:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TMT Pensiun Dini
1	Harizul Watani	Panitera Pengganti	Kepaniteraan	1 September 2022

Tabel 3-2. Pensiun Pegawai pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Sehingga jumlah pegawai Pengadilan Agama Padang Panjang per Desember 2022 berjumlah 20 orang dengan rincian sebagai berikut :



Grafik 3-1. Sebaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang.

Sebaran tenaga teknis dan non teknis tersebut diatas pada lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang diuraikan pada table berikut:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Zakiyah Ulya, S.H.I.	Ketua	
2	Agus Sopyan, S.H.I.,M.H.	Wakil Ketua	
3	Rifazul Azdmi, S.H.I.	Hakim	
4	Ranti Rafika Dewi, S.H.I.	Hakim	
5	Drs. Mawardi	Panitera	
6	Usman, S.H.	Sekretaris	
7	Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.	Panmud Hukum	
8	Nurainiwista, S.H.	Panmud Gugatan	
9	Asri, S.H.I.	Panmud Permohonan	
10	Aldi Farido Utama, S.H.I.	Kasubbag Keuangan dan Umum	
11	Rahmat Hidayat, S.E., S.H.	Kasubbag Perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan.	
12	Isnaini	Kasubbag Kepegawaian, organisasi, dan tata laksana	
13	Wenny Oktavia, S.H.I.	PaniteraPengganti	
14	Salman	JurusitaPengganti	
15	Annisa Dwi Nidia, S.Kom.	Pranata Komputer – Ahli Pertama	
16	R.A. Fadillah Ariyani, A.Md.	Arsiparis - Terampil	
17	Muhammad Hadiassalam, S.H.	CPNS	
18	Alfariz Maulana Reza, S.H.	CPNS	



19	Nisa Hundani Nabila, A.Md.A.B.	CPNS
20	Suci Fitrah Insani, A.Md.	CPNS

Tabel 3-1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Sebaran tingkat pendidikan Aparatur Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang:

**a. Hakim**

No	Jabatan	Jumlah		Pendidikan Tertinggi		
		Laki-Laki	Perempuan	S1	S2	S3
1	Ketua	-	1	1	-	-
2	Wakil Ketua	1	-	-	1	-
3	Hakim	1	1	2	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>4</b>		<b>4</b>		

Tabel 3-2. Tenaga Hakim pada Pengadilan Agama Padang Panjang

**b. Kapaniteraan**

No	Jabatan	Jumlah		SLTA	D3	Pendidikan Tertinggi		
		Laki-Laki	Perempuan			S1	S2	S3
1	Panitera	1	-	-	-	1	-	-
2	Panitera Muda	2	1	-	-	2	1	-
3	Panitera Pengganti	-	1	-	-	-	1	-
4	CPNS	2	2	-	2	2	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>9</b>			<b>9</b>			

Tabel 3-3. Tenaga Kapaniteraan pada Pengadilan Agama Padang Panjang

**c. Kejurusitaan**

No	Jabatan	Jumlah		SLTA	D3	Pendidikan Tertinggi		
		Laki-Laki	Perempuan			S1	S2	S3
1	Jurusita	-	-	-	-	-	-	-
2	Jurusita Pengganti	1	-	1	-	-	-	-

<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>1</b>		<b>1</b>				

Tabel 3-4. Tenaga Kejurusitaan pada Pengadilan Agama Padang Panjang

#### d. Kesekretariatan

No	Jabatan	Jumlah		SLTA	D3	Pendidikan Tertinggi			
		Laki-Laki	Perempuan			S1	S2	S3	
1	Sekretaris	1	-	-	-	1	-	-	
2	Kepala Sub Bagian	2	1	1	-	2	-	-	
3	Fungsional/Staff	-	2	-	1	1	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Jumlah Total</b>		<b>6</b>		<b>6</b>					<b>-</b>

Tabel 3-5. Tenaga Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Padang Panjang

#### e. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Pengadilan Agama Padang Panjang memiliki 10 (sepuluh) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang penggajiannya bersumber pada DIPA Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022.

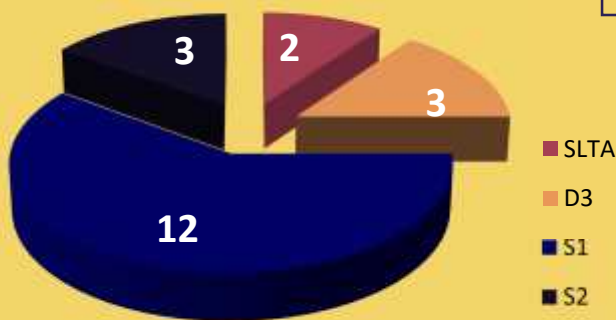
No.	Nama	Jabatan
1.	Amizar, S.E.	Satpam
2.	Ronaldo Bahri, S.E.	Satpam
3.	Febri Andri Yanto	Satpam
4.	Dirga Irawan	Sopir
5.	Hj. Yeni, S.H.I.	Pramubakti
6.	Linda Elsidia, S.H.	Pramubakti
7.	Ermayentis	Pramubakti
8.	Rahmad Syadiki, S.H.	Pramubakti
9.	Muhammad Hadi, S.H.	Pramubakti
10.	Mifta Hurrizki	Pramubakti

Tabel 3-6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Padang Panjang

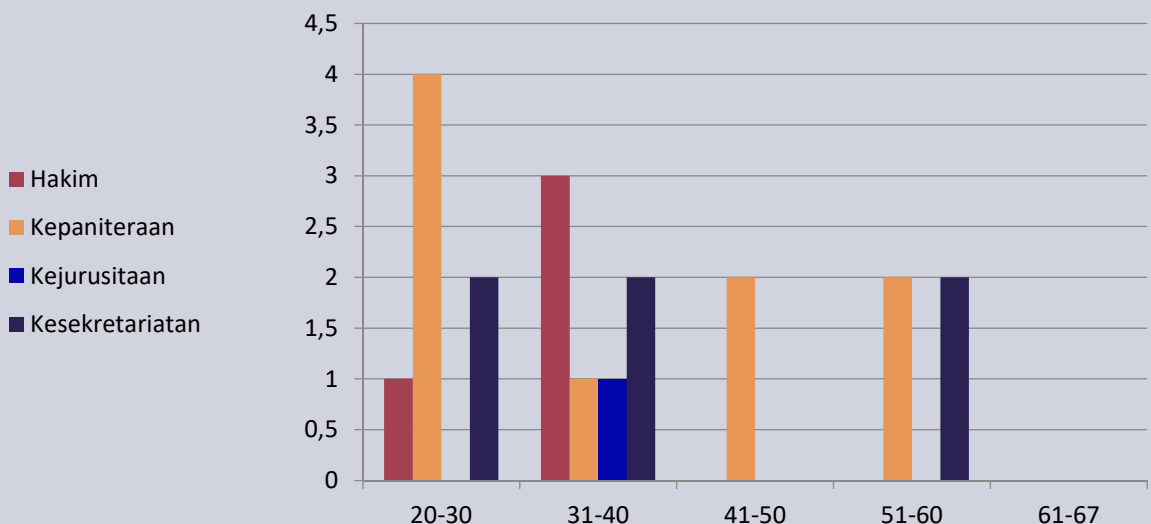
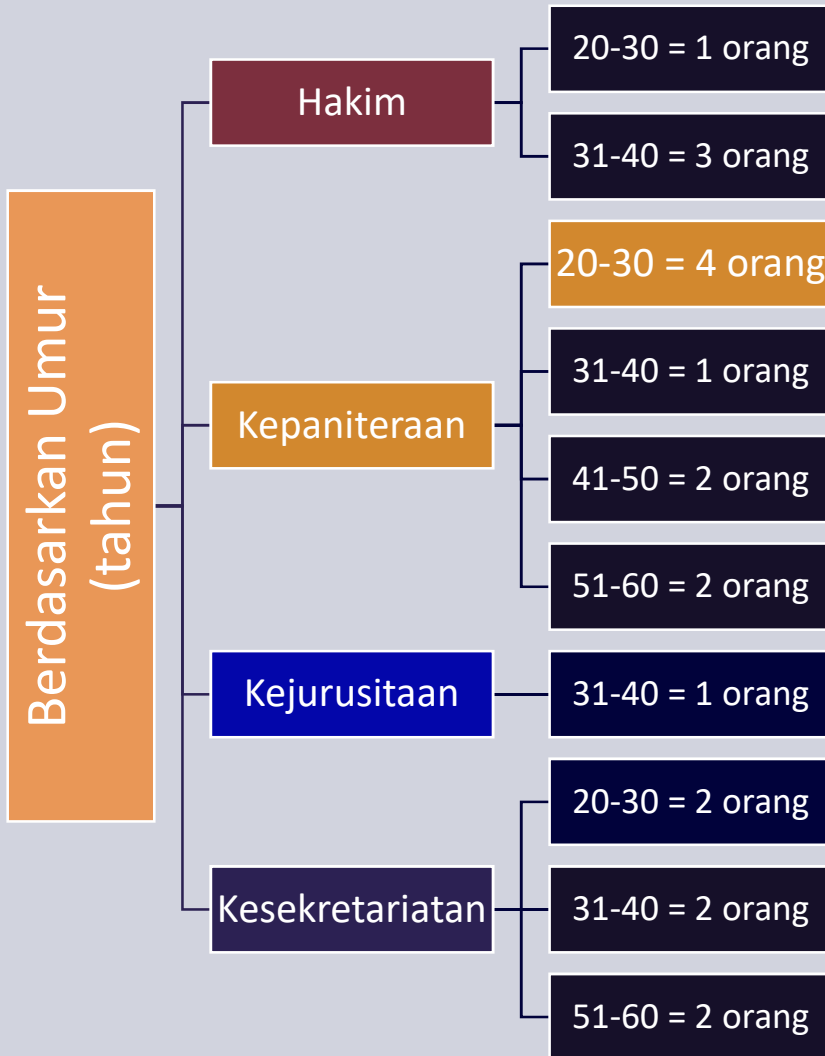
## SEBARAN APARATUR SIPIL NEGARA DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG



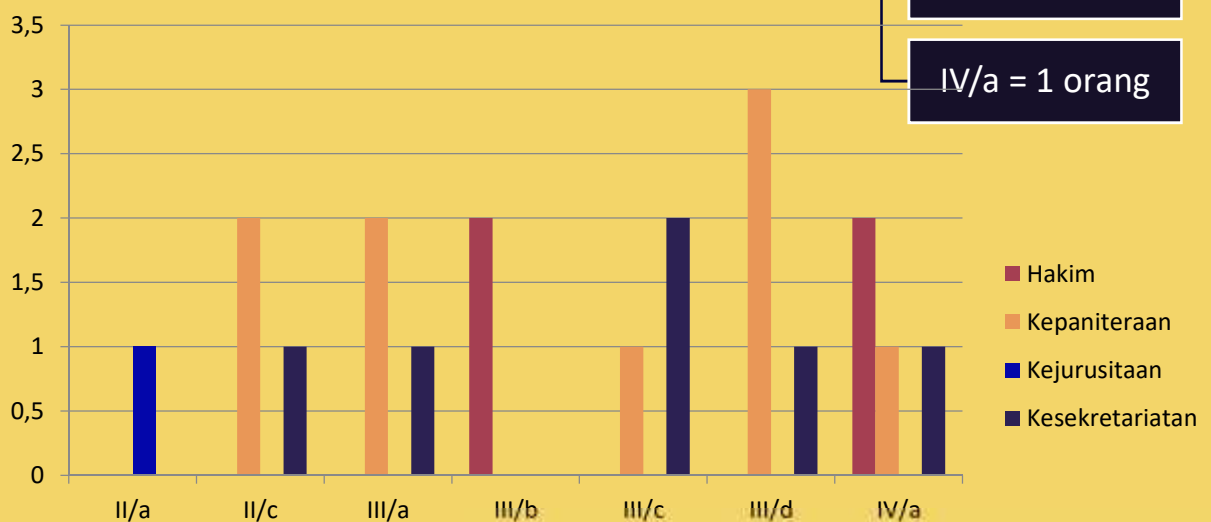
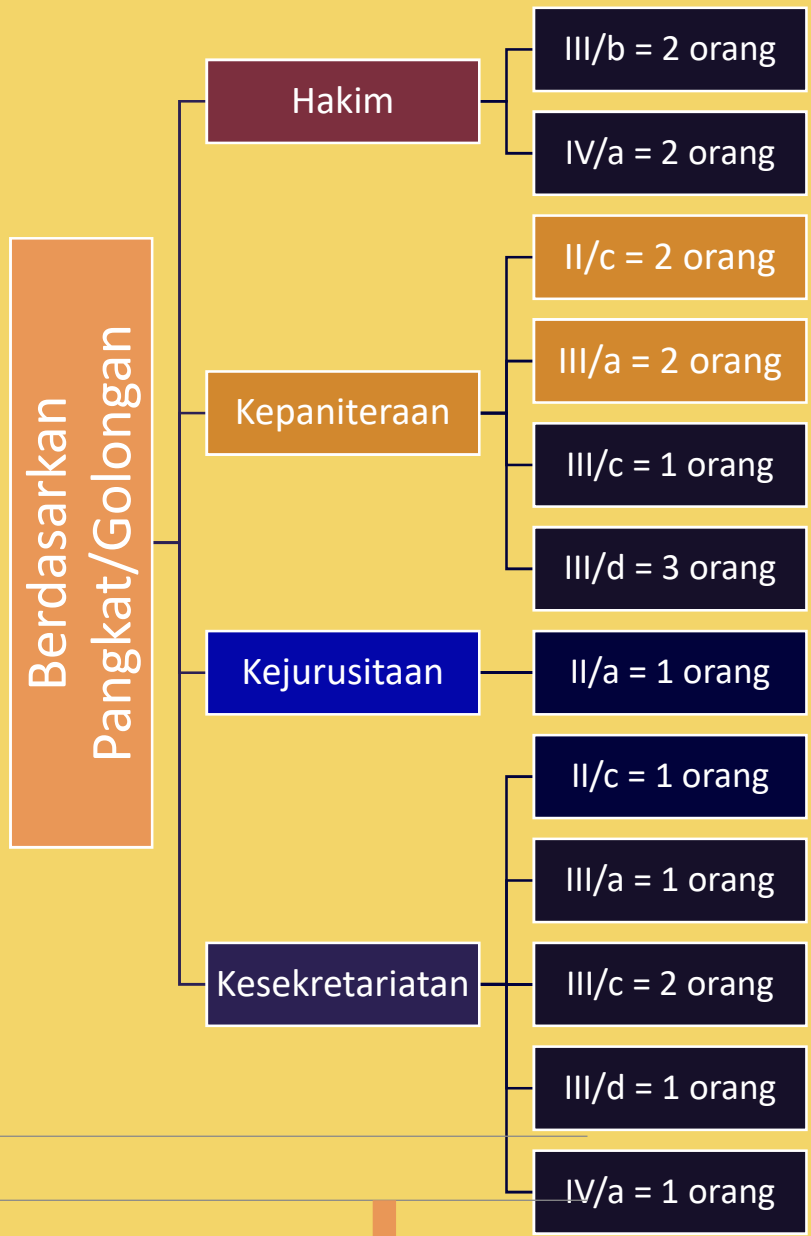
# SEBARAN APARATUR SIPIL NEGARA DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG



## SEBARAN APARATUR SIPIL NEGARA DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG



# SEBARAN APARATUR SIPIL NEGARA DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG



Dengan memperhatikan data yang diuraikan pada bagian sebelumnya, kebutuhan sumber daya manusia dilingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jabatan struktural Pengadilan Agama Padang Panjang sampai dengan Desember 2022 telah terisi semua.
- b. Pada Pengadilan Agama Padang Panjang tidak didukung oleh tenaga administrasi di bagian kepaniteraan. Sehingga pekerjaan administrasi perkara dan keuangan perkara pada Pengadilan Agama Padang Panjang seperti pendaftaran perkara pada Meja I (penerimaan perkara),Mejall (pendaftaran perkara),Meja III (penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan pengelolaan perkara pada tingkat banding dan kasasi) dan petugas pemegang kas, dilaksanakan oleh Panitera Muda atau Panitera Pengganti, bahkan dibantu oleh tenaga PPNPN.
- c. Dari tabel sebaran tenaga kepaniteraan, terdiri dari 9 orang tenaga kepaniteraan (Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan CPNS), untuk menjamin terselenggaranya administrasi peradilan.

Tentang Aparatur Sipil Negara juga mengatur bahwa pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pelaksana/staf, sedangkan pada Pengadilan Agama Padang Panjang hanya ada 2 (dua) orang staf.

## 1. Mutasi

No	Tanggal	Nama	Jabatan	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar
1	28 Juli 2022	Dewita Irma Sari, S.H.I.	Panmud Permohonan	-	PA Solok
2	29 Juli 2022	Suherman, S.H.	Panmud Permohonan	-	PA Batusangkar
3	29 Juli 2022	Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.	Panmud Hukum	PA Padang Panjang	-
4	29 Juli 2022	Rini Anggawati, S.H.	Panmud Hukum	-	PA Labuk Basung
5	29 Juli 2022	Murti Dewi, S.H.I.	Panitera Pengganti	-	PA Tanjung Pati
6	12 September 2022	Zakiah Ulya, S.H.I.	Ketua	PA Padang Panjang	-
7	16 September 2022	Ariefarahmy, S.H.I., M.A.	Wakil Ketua		PA Pariaman

Tabel 3-9. Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang



yang Mutasi masuk dan Keluar

**5 orang**

**Mutasi Keluar**

Pengadilan Agama Padang Panjang

**2 orang**

**Mutasi Masuk**

Pengadilan Agama Padang Panjang

**4 orang**

**CPNS Masuk**

Pengadilan Agama Padang Panjang

## 2. Promosi

a. Jabatan Hakim tingkat banding

Pada tahun 2022 tidak ada Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dipromosikan menjadi Hakim tingkat banding.

b. Jabatan Hakim tingkat pertama

Pada tahun 2022 terjadi promosi di mana Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Ariefarahmy, S.H.I., M.A. Promosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB.

c. Jabatan kepaniteraan

Pada tahun 2022 terjadi promosi di mana Panitera Muda Hukum Suherman, S.H. promosi menjadi Panitera Muda Permohonan pada Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB.

d. Jabatan kejurusitaan

Pada tahun 2022 tidak ada pengangkatan Jurusita, yang ada Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Padang Panjang sebanyak 1 (satu) orang.

e. Jabatan kesekretariatan

Pada tahun 2022 tidak ada yang dipromosikan.

## 3. Pensiun

Pada Tahun 2022, Pegawai Pengadilan Agama Padang Panjang yang telah mengajukan Pensiun Dini adalah:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TMT Pensiun Dini
1	Harizul Watani	Panitera Pengganti	Kepaniteraan	1 September 2022

#### **4. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)**

Selama Tahun 2022 Pegawai Pengadilan Agama Padang Panjang telah mengikuti beberapa diklat yaitu:

- a. Ariefarahmy, S.H.I., M.A., Jabatan Ketua mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Golongan III, Angkatan 7 tahun 2021 Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator bagi Hakim Lingkungan Peradilan Agama yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Januari s/d 18 Februari 2022.
- b. Suherman, S.H., Jabatan Panitera Muda Hukum mengikuti Pelatihan singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia yang diadakan oleh Badan Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI mulai tanggal 15 s/d 17 Maret 2022.
- c. Dewita Irma Sari, S.H.I., Jabatan Panitera Pengganti mengikuti Pelatihan singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia yang diadakan oleh Badan Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI mulai tanggal 15 s/d 17 Maret 2022.
- d. Rini Anggawati, S.H., Jabatan Panitera Pengganti mengikuti Pelatihan Bendahara yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 21 s/d 29 Maret 2022.
- e. R.A. Fadilah Ariyani, A.Md., Jabatan Arsiparis Terampil mengikuti Pelatihan Bendahara yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 17 s/d 25 Mei 2022
- f. Muhammad Hadiassalam, S.H., Jabatan CPNS Analis Perkara Peradilan mengikuti Pembekalan bagi CPNS pada Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 28 Juni 2022.
- g. Alfariz Maulana Reza, S.H. Jabatan CPNS Analis Perkara Peradilan mengikuti Pembekalan bagi CPNS pada Pengadilan Agama di wilayah

Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 28 Juni 2022.

- h. Suci Fitrah Insani, A.Md., Jabatan CPNS Pengelola Perkara mengikuti Pembekalan bagi CPNS pada Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 28 Juni 2022.
- i. Nisa Hundani Nabila, A.Md.A.B., Jabatan CPNS Pengelola Perkara mengikuti Pembekalan bagi CPNS pada Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 28 Juni 2022.
- j. Muhammad Hadiassalam, S.H. Jabatan CPNS Analis Perkara Peradilan mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan I Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Padang tanggal 5 September s/d 12 November 2022.
- k. Alfariz Maulana Reza, S.H., Jabatan CPNS Analis Perkara Peradilan mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan I Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Padang tanggal 5 September s/d 12 November 2022.
- l. Suci Fitrah Insani, A.Md., Jabatan CPNS Pengelola Perkara mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan III Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Padang tanggal 12 September s/d 19 November 2022.
- m. Nisa Hundani Nabila, A.Md.A.B., Jabatan CPNS Pengelola Perkara mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan III Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Padang tanggal 12 September s/d 19 November 2022.

# BAB IV

## PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

### A. PENGELOLAAN KEUANGAN

#### 1. Alokasi Anggaran

Untuk tahun 2022, Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.668.177.000,- (Tiga milyar enam ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang dibagi atas 3 (tiga) program yaitu:

1. Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung RI
3. Peningkatan manajemen Peradilan Agama

Sedangkan pada tahun 2021, Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.038.289.000,- (Tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal ini menunjukkan adanya penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 629.888.000,- (Enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Dimana pada program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp. 356.638.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) pada program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung RI terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp. 226.500.000,- (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus rupiah) dan pada program peningkatan manajemen Peradilan Agama terjadi kenaikan sebesar Rp. 46.750.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Alokasi anggaran untuk masing-masing program dapat dilihat sebagai berikut:

NO	PROGRAM	PAGU 2022 (Rp)	PAGU 2021 (Rp)
1.	Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI	3.325.927.000	2.969.289.000
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI	264.000.000	37.500.000
3.	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	78.250.000	31.500.000
	<b>TOTAL</b>	<b>3.668.177.000</b>	<b>3.038.289.000</b>

**Tabel 4-1:** Alokasi anggaran per-program pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Rincian penggunaan anggaran dari masing-masing pagu per-program sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung terdiri atas belanja gaji sebesar Rp. 2.210.909.000,- (Dua milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar gaji aparatur sipil negara dan belanja barang sebesar Rp.1.115.018.000,- (Satu milyar seratus lima belas juta delapan belas ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membiayai biaya operasional kantor.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI terdiri atas belanja modal sebesar Rp.264.000.000,- (Dua ratus enam puluh empat juta rupiah) yang dipergunakan untuk belanja sarana dan prasarana berupa alat pengolah data untuk peningkatan pelayanan kepada para pencari keadilan.
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama terdiri atas belanja barang sebesar Rp. 78.250.000,- (Tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk peningkatan akses peradilan diantaranya pembebasan biaya perkara, sidang keliling dan pos layanan hukum untuk para pencari keadilan.

Secara rinci, alokasi anggaran yang diterima oleh masing-masing satker TA. 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang dapat dilihat sebagai berikut:

No	Satker	Gaji	Barang	Modal	Badilag	Jumlah
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp. 2.210.909.000	Rp. 1.115.018.000	Rp. 264.000.000	Rp. 78.250.000	Rp3.668.177.000
	<b>TOTAL</b>	Rp. 2.210.909.000	Rp. 1.115.018.000	Rp. 264.000.000	Rp. 78.250.000	Rp3.668.177.000

**Tabel 4-2:** Alokasi anggaran per-jenis belanja pada Pengadilan Agama Padang Panjang

## 2. Realisasi Anggaran Tahun 2022

### 2.1 Belanja Pegawai

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	Perse ntase
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp. 2.210.909.000	Rp. 2.202.213.362	Rp. 8.695.638	99,60 %
	<b>TOTAL</b>	Rp. 2.210.909.000	Rp. 2.202.213.362	Rp. 8.695.638	99,60 %

**Tabel 4-3:** Realisasi belanja pegawai TA 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

### 2.2 Belanja Barang

Belanja Barang terdiri dari 2 DIPA yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi (01) dan DIPA Ditjen BADILAG (04).

Adapun Rekapitulasi Belanja Barang DIPA (01) Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai berikut :

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp. 1.115.018.000	Rp.1.101.238.000	Rp.13.780.000	98,76%
	<b>TOTAL</b>	Rp. 1.115.018.000	Rp.1.101.238.000	Rp.13.780.000	98,76%

**Tabel 4-4:** Realisasi belanja barang (005.01) TA. 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

Adapun Rekapitulasi Belanja Barang DIPA (04) Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai berikut :



NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp. 78.250.000	Rp. 76.150.000	Rp. 2.100.000	97,32 %
<b>TOTAL</b>		Rp. 78.250.000	Rp. 76.150.000	Rp. 2.100.000	97,32 %

**Tabel 4-5:** Realisasi belanja barang (005.04) TA. 2022 pada PA Padang Panjang

## 2.3 Belanja Modal

Rekapitulasi Belanja Modal Pengadilan Agama Padang Panjang Sebagai berikut;

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp. 264.250.000	Rp. 263.245.000	Rp. 755.000	99,71 %
<b>TOTAL</b>		Rp. 264.250.000	Rp. 263.245.000	Rp. 755.000	99,71 %

**Tabel 4-6:** Realisasi belanja modal TA. 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

## 2.4 Realisasi PNBPN Tahun Anggaran 2022

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA. 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang. dapat dilihat sebagai berikut:

### a) DIPA 01

Realisasi PNBPN Pengadilan Agama Padang Panjang sebesar Rp. 1.591.368 merupakan pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, sedangkan pagu PNBPN sebesar Rp. 1.857.000,- merupakan estimasi pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	%	KE T
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp.1.857.000	Rp.1.591.368	85,70%	
<b>TOTAL</b>		Rp.1.857.000	Rp.1.591.368	85,70%	

**Tabel 4-7:** Realisasi PNBPN DIPA 01 TA. 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

**b) DIPA 04**

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Panjang	30.486.000	29.597.000	97.08	
<b>TOTAL</b>		30.486.000	29.597.000	97.08	

**Tabel 4-8:** Realisasi PNBP DIPA 04 TA. 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

### **3. Pengelolaan Keuangan Pengadilan Agama Padang Panjang**

#### **1. Pelaporan keuangan berbasis akrual**

Implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual sudah dimulai sejak tahun 2015. Hal ini menjadi langkah penting bagi pemerintah dalam menyediakan informasi yang lebih baik terutama dalam menyajikan informasi terkait pengukuran kinerja pemerintah.

Pada tanggal 4 Maret 2015 Kemenkeu menyelenggarakan *kick off* Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam rangka menciptakan momentum awal penerapan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta guna menciptakan semangat dan komitmen kuat pada pimpinan Kementerian/Lembaga terhadap implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan tetap mempertahankan peningkatan kualitas pelaporan keuangan.

*Kick off* Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ini menjadi tanda dimulainya penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa tahun 2015 merupakan awal penyusunan laporan keuangan berbasis akrual oleh pemerintah.

Akuntansi berbasis akrual tidak hanya dapat menghasilkan nilai beban yang telah dibayarkan oleh pemerintah, namun seluruh beban yang diperlukan sehingga biaya pelayanan publik dapat dihitung secara lebih wajar. Dengan demikian pengelolaan keuangan negara dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan amanat UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 7 Permenkeu RI Nomor 177/PMK.05/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual secara penuh mulai Tahun Anggaran 2015. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI yang digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan meliputi LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK yang disertai dengan pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern, dan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI sebagai Pengguna Anggaran.

Dalam rangka mendukung keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Mahkamah Agung RI, kegiatan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai berikut:

- a. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan Sistim Akuntansi Instansi Berbasis Akrual baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung, maupun yang di adakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi.
- b. Mengadakan sosialisasi, rekonsiliasi dan konsolidasi SAIBA dengan Korwil PTA Padang
- c. Melaksanakan rekonsiliasi internal dan eksternal dengan KPPN Bukittinggi

## 2. Penatausahaan PNB

Dengan adanya aplikasi SIMARI PNB *Online*, Mahkamah Agung RI membuat terobosan yang sangat penting dalam mengimplementasikan Visi Mahkamah Agung RI, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Untuk mendukung Visi Mahkamah Agung RI tersebut harus diterapkan sistem yang berbasis TI. Hal ini sesuai dengan salah satu dari 10 karakter Badan Peradilan yang Agung, yaitu “Badan Peradilan yang berbasis TI terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern”.

Melalui pengembangan aplikasi PNB Mahkamah Agung RI *Online* pada SIMARI, Bendahara Penerimaan pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya lebih sistematis dalam melakukan tugas dan fungsinya mulai dari Penetapan Target PNB, Penerimaan Uang PNB, Penyetoran Uang PNB, Pembukuan PNB, Pelaporan Realisasi PNB, sehingga seluruh Bendahara Penerimaan akan tertib, seragam, dan lebih akuntabel dalam pengelolaan penatausahaan PNB.

Sesuai dengan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 96/BUA/HM.01.2/4/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Penggunaan Modul Aplikasi PNB Mahkamah Agung RI *Online*, Bendahara Penerimaan pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya diwajibkan untuk menggunakan aplikasi PNB Mahkamah Agung RI *Online* pada SIMARI dengan alamat <https://simari.mahkamahagung.go.id>

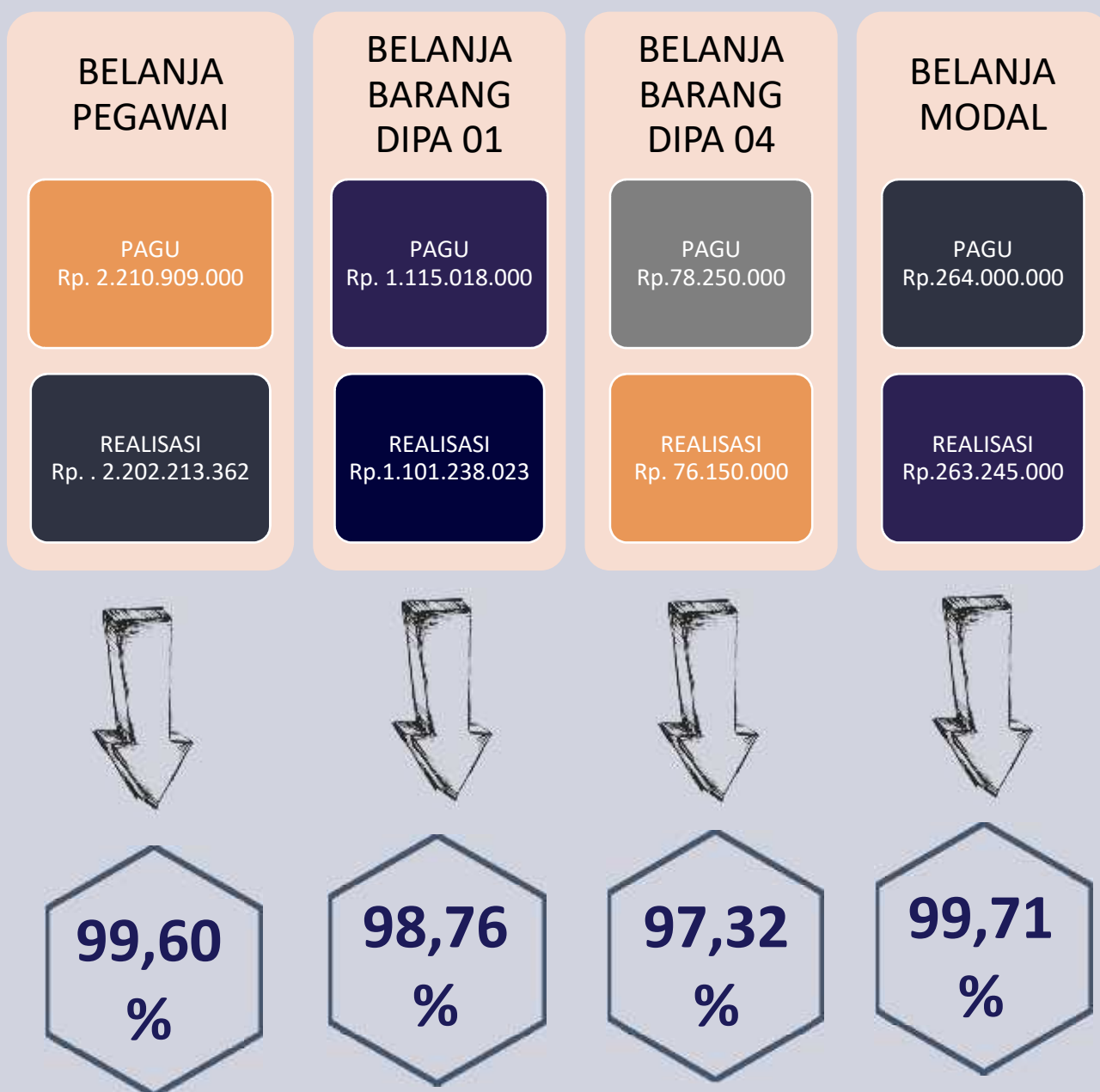
## 3. Prestasi Pengadilan Agama Padang Panjang dalam pengelolaan keuangan

Sebagai bentuk ketaatan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam mengelola keuangan yang berada dalam penguasaannya secara tertib, sampai dengan tahun 2021 telah diperoleh penghargaan-penghargaan dari instansi terkait, sebagai berikut:

NO	SATKER	Kategori	Jenis	Instansi	Ket
		Penghargaan		Pemberi	
1	-	-	-	-	

**Tabel 4-9:** Penghargaan yang didapatkan atas pengelolaan keuangan pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

## REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG



## B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

### 1. Gambaran Umum

Pengadilan Agama Padang Panjang telah melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, baik prasarana gedung maupun sarana fasilitas gedung dan kesemuanya itu telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Semua sarana dan prasarana gedung tersebut merupakan barang inventaris kantor telah teraplikasi kedalam aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara). Sesuai peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 120/PMK.6/2007 tentang Penata Usahaan Barang Milik Negara. Salah satunya untuk pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui opname fisik barang inventaris (OFBI) disampaikan secara periodik persemester dan tahunan dari UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) ke UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan Mahkamah Agung RI selaku UAPB (Unit Akuntansi Pengguna Barang).

### 2. Inventarisasi Kekayaan Negara

Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang terdiri atas tanah, gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud. Aset dimaksud merupakan sarana dan prasarana Pengadilan yang dipergunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Adapun golongan dan nilai BMN yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang pada tahun anggaran 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	GOLONGAN BARANG	NILAI (Rp)
1.	Tanah	7.652.500.000
2.	Peralatan dan Mesin	2.399.869.303

3.	Gedung dan Bangunan	2.835.182.000
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
5.	Aset Tetap Lainnya	47.003.849
6.	Aset Tak Berwujud	26.800.000
	Jumlah	12.961.355.152

Tabel 4-10 : Data golongan dan nilai aset yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2022



Grafik 4-1: Statistik Aset TA. 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Dari tabel di atas, masing-masing BMN pada Pengadilan Agama Padang Panjang dapat dirinci setiap golongan barang sebagai berikut:

**a. Tanah**

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI untuk digunakan dalam pelayanan publik.

Nilai tanah TA. 2021 dan 2022 sebagai berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2021	2022
Pengadilan Agama Padang Panjang	7.652.500.000	7.652.500.000
<b>Total</b>	<b>7.652.500.000</b>	<b>7.652.500.000</b>

Tabel 4-11: Nilai Tanah yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2022 dan TA. 2021



**b. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin yang dimaksud disini adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan publik. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain: alat angkutan, alat kantor dan alat rumah tangga, alat studio, alat komunikasi, alat pemancar, alat pengolah data, alat keselamatan kerja, dan alat peraga.

Nilai peralatan dan Mesin TA. 2021 dan TA. 2022 dapat dirinci sebagaimana berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2021	2022
Pengadilan Agama Padang Panjang	1.841.179.553	2.419.719.303
<b>Total</b>	<b>1.841.179.553</b>	<b>2.419.719.303</b>

**Tabel 4-12:** Nilai Peralatan dan Mesin yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2021 dan TA. 2022

Dari tabel di atas terjadi kenaikan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp. 578.539.750, kenaikan tersebut di karenakan adanya belanja modal berupa pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi (PC. Unit) sebanyak 3 unit dan printer sebanyak 2 unit dengan nilai Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), Pengadaan Genset 1 unit dengan nilai Rp. 199.245.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah). Adanya transer masuk dari Badan Urusan Administrasi berupa pengadaan perlengkapan persidangan dengan nilai Rp. 295.444.750 (Dua ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Dan transfer masuk berupa Alat Pengolah Data dari Badan Urusan Administrasi senilai Rp. 19.850.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Kondisi kendaraan dinas yang ada pada Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>					
1	Station Wagon (Toyota Innova)	2006	√	-	-	
<b>II</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 2</b>					
1	Sepeda Motor (Honda Supra X 125)	2005	√	-	-	
2	Sepeda Motor (Mega Pro CW 1600)	2007	√	-	-	
3	Sepeda Motor (New Mega Pro CW 1600)	2008	√	-	-	
4	Sepeda Motor (New Mega Pro CW 1600)	2008	√	-	-	

**Tabel 4-13:** Kondisi kendaraan dinas yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2022

### c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dimaksud disini adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan publik. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam gedung dan bangunan ini mencakup antara lain: bangunan gedung kantor dan bangunan rumah negara.

Nilai gedung dan bangunan TA. 2021 dan TA. 2022 dapat dirinci sebagaimana berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2021	2022
Pengadilan Agama Padang Panjang	2.835.182.000	2.835.182.000
<b>Total</b>	<b>2.835.182.000</b>	<b>2.835.182.000</b>

**Tabel 4-14:** Nilai gedung dan bangunan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2021 dan TA. 2022

Kondisi Rumah Dinas yang ada pada Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Rumah Dinas</b>					
1	Rumah Dinas Ketua	1	Baik			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	0				
3	Rumah Dinas Hakim	0				
4	Rumah Dinas Panitera	0				
5	Rumah Dinas Sekretaris	0				
6	Mes	0				
7	Dst					

**Tabel 4-15:** Kondisi rumah dinas yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2022

#### d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud disini adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan publik. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam jalan, irigasi dan jaringan ini mencakup antara lain: instalasi air dan jaringan LAN.

Nilai jalan, irigasi dan jaringan TA. 2021 dan TA. 2022 dapat dirinci sebagaimana berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2021	2022
<b>Pengadilan Agama Padang Panjang</b>	-	-
<b>Total</b>		

**Tabel 4-16:** Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2021 dan TA. 2022

**e. Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini terdiri atas: koreksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni, budaya dan olah raga. Nilai aset tetap lainnya TA. 2021 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2021	2022
Pengadilan Agama Padang Panjang	46.646.640	47.003.849
Total	46.646.640	47.003.849

Tabel 4-17: Nilai aset tetap lainnya yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2021 dan TA. 2022

**f. Aset Tak Berwujud**

Aset tak berwujud merupakan aset non moneter yang bisa diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik secara nyata. Aset tak berwujud yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Padang Panjang terdiri atas: aplikasi dan website. Nilai aset tak berwujud TA. 2010 dan TA. 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2021	2022
Pengadilan Agama Padang Panjang	26.800.000	26.800.000
Total	26.800.000	26.800.000

Tabel 4-18: Nilai aset tak berwujud yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2021 dan TA. 2022

### 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana

**1. Pembangunan Gedung Kantor**

Dalam tahun anggaran 2022 Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi belanja modal pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 0,- ( nol rupiah) terdiri dari pembangunan gedung baru sebesar Rp. 0,- ( nol rupiah ) dan pembangunan gedung kantor lanjutan sebesar Rp.0,- ( nol rupiah). Rincian pembangunan gedung kantor TA. 2022 dan 2021 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2021	2022
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-
	<b>TOTAL</b>		

**Tabel 4-19:** Pembangunan gedung kantor lanjutan pada Pengadilan Agama Padang Panjang

## 2. Renovasi, Rehabilitasi dan Restorasi Gedung Kantor

Dalam tahun anggaran 2022 Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi belanja modal renovasi, rehabilitasi dan restorasi gedung kantor sebesar Rp. 0,- (nol rupiah). Rincian belanja modal renovasi, rehabilitasi dan restorasi gedung kantor TA. 2021 dan 2022 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2021	2022
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-

**Tabel 4-20:** Renovasi, rehabilitasi dan restorasi gedung kantor pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

## 3. Pembangunan, Renovasi dan Rehabilitasi Rumah Negara

Dalam tahun anggaran 2022 Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi belanja modal pembangunan, renovasi dan rehabilitasi rumah negara sebesar Rp. 0,- ( nol rupiah ). Rincian belanja modal pembangunan, renovasi dan rehabilitasi rumah negara TA. 2021 dan 2022 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2021	2022
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-

**Tabel 4-21:** Pembangunan, renovasi dan rehabilitasi rumah negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

## 4. Sarana dan Prasarana Lingkungan

Dalam tahun anggaran 2022 Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi belanja modal sarana dan prasarana lingkungan peradilan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

Rincian belanja modal sarana dan prasarana lingkungan peradilan TA. 2021 dan 2022 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2021	2022
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-

**Tabel 4-22:** Sarana dan prasarana lingkungan peradilan pada lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang

#### 5. Pengadaan peralatan dan Mesin

Dalam tahun anggaran 2022 Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi belanja modal pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 263.245.000,-(Dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah). Rincian belanja modal pengadaan peralatan dan mesin TA. 2021 dan 2022 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2021	2022
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	37.500.000	263.245.000
	<b>TOTAL</b>	25.000.000	263.245.000

**Tabel 4-23:** Pengadaan peralatan dan mesin pada Pengadilan Agama Padang Panjang

#### 6. Pengadaan Kendaraan Dinas

Dalam tahun anggaran 2022 Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi belanja modal pengadaan kendaraan dinas sebesar Rp 0,- (nol rupiah). Rincian belanja modal pengadaan kendaraan dinas TA. 2021 dan 2022 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2022	2023
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-

**Tabel 4-24:** Pengadaan kendaraan dinas pada lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang.

## 7. Hibah dan Tukar Menukar BMN

### a. Hibah

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pengadilan Agama Padang Panjang, selain menggunakan pembiayaan yang bersumber dari APBN, juga telah menerima sumber yang berasal dari hibah, baik hibah dalam negeri maupun hibah dari luar negeri. Hal ini diatur sebagaimana PP Nomor 10 tahun 2011 tentang tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, serta PP Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah yang selanjutnya diatur dalam PMK No. 99/PMK.05/2017 tentang Mekanisme Hibah.

Guna mengatur tata cara pengelolaan hibah dari luar negeri, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Perma RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama antara Mahkamah Agung RI dengan Pemberi Hibah, sedangkan hibah yang berasal dari dalam negeri berpedoman pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Padang Panjang telah menerima hibah dengan rincian sebagai berikut:

NO	SATKER	ASAL	NILAI	NPH
		PEROLEHAN	PEROLEHAN	
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-	-
TOTAL			-	-

**Tabel 4-25:** Rekapitulasi penerimaan hibah langsung bentuk uang tahun 2021 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

NO	SATKER	ASAL	NILAI	NPH
		PEROLEHAN	PEROLEHAN	
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-	-
TOTAL			-	-

**Tabel 4-26:** Rekapitulasi penerimaan hibah langsung bentuk barang tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

b. Tukar Menukar BMN

Pengadilan Agama Padang Panjang juga dimungkinkan untuk melakukan tukar menukar BMN terhadap aset yang tidak lagi digunakan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi satker, hal ini sesuai dengan PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN. Tahun 2020 tidak terdapat tukar menukar BMN.

**8. Alih Fungsi dan Pinjam Pakai**

a. Alih Fungsi BMN

Alih Fungsi Barang Milik Negara (BMN) merupakan tindakan Pengamanan/Penyelamatan BMN, khususnya eks Bangunan Gedung Kantor yang tidak dipergunakan lagi dan dialih fungsikan menjadi mess/tempat tinggal untuk pejabat dan pegawai. Alih fungsi bertujuan untuk menyelamatkan BMN khususnya eks gedung kantor agar tidak ditelantarkan sehingga menjadi BMN *idle*. Hal itu sesuai dengan PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN Pasal 7 ayat 1 (e) yang berbunyi: Pengguna Barang memiliki kewenangan tanggung jawab melakukan Penguasaan dan Pengendalian atas penggunaan BMN yang berada dalam pengawasannya.

Peraturan lain yang berkaitan dengan alih fungsi adalah PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penguasaan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN).

Satker yang melaksanakan alih fungsi eks bangunan gedung kantor menjadi mess sebagaimana tabel berikut:

NO	SATKER	BMN YANG DIALIH FUNGSIKAN
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-

**Tabel 4-27:** BMN yang dialih fungsikan TA. 2021 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

b. Pemanfaatan BMN (Pinjam Pakai).

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan, masih terdapat satker di lingkungan Mahkamah Agung RI mendapat



bantuan dari Pemerintah Daerah setempat berupa lahan tanah dan atau bangunan, serta kendaraan dinas. Hal ini dimungkinkan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemanfaatan Barang Milik Negara.

c. Penghapusan BMN.

Penghapusan aset dilakukan berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penghapusan BMN dan PMK Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang. Untuk Tahun 2018, penghapusan BMN dapat dilihat dari tabel berikut:

NO	SATKER	JENIS BMN YANG DIHAPUSKAN	NILAI (Rp)	SK
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Peralatan dan Mesin	-	-

Tabel 4-28: Penghapusan BMN TA. 2021 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

#### 4. Prestasi dan Penghargaan yang Diperoleh dalam Pengelolaan BMN

Sebagai bentuk ketaatan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam mengelola BMN yang berada dalam penguasaannya secara tertib, sampai dengan tahun 2021 telah diperoleh penghargaan-penghargaan dari instansi terkait, sebagai berikut:

NO	SATKER	Kategori	Jenis	Waktu Perolehan	Instansi Pemberi	Ket
		Penghargaan				
	-	-	-	-	-	

Tabel 4-29: Penghargaan yang diterima dalam pengelolaan BMN sampai tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

## 5. Matriks Sarana/Prasarana di Pengadilan Agama Padang Panjang

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	*Keterangan
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Sarana/Prasarana Gedung</b>		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Kepaniteraan	1	
7	Ruang Kesekretariatan	1	
8	Ruang Panitera Pengganti	1	
9	Ruang Pustaka	1	
10	Ruang Jurusita/Jurusita Pengganti	1	
11	Ruang IT	1	
12	Ruang Arsip	1	
13	Ruang Arsip Non Perkara	1	
14	Ruang Mediasi	1	
15	Ruang Sidang	1	
16	Ruang Tunggu Sidang	2	
17	Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	
18	Ruang Tunggu Pelayanan	1	
19	Ruang Resepsionis	1	
20	Ruang Posbakum	1	
21	Ruang Kaukus	1	
22	Ruang Laktasi dan Bermain Anak	1	
<b>II</b>	<b>Sarana/Prasrana Fasilitas Perkantoran</b>		
1	Laptop	26 (dua puluh) buah	3 (tiga) buah Rusak Berat
2	Komputer	34 (dua puluh empat) buah	8 (delapan) buah Rusak Berat
3	Infokus	1 (satu) buah	
4	PABX	10 (sepuluh) buah	
5	Meja	49 (empat puluh sembilan) buah	
6	Kursi	113 (seratus tiga belas) buah	
7	Printer	17 (lima belas) buah	5 (lima) Rusak Berat

**Tabel 4-30:** Matriks sarana/ prasarana tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

## C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sejak tahun 2003 sejalan dengan *Blue Print* Pembaruan Peradilan, Mahkamah Agung RI secara konsisten terus melakukan reformasi peradilan melalui berbagai program pembaruan dan pembenahan yang terus menerus. Bahkan di tahun 2010, Mahkamah Agung RI kembali mengeluarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang menetapkan Visi Badan Peradilan yang baru, yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Cetak Biru ini dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Salah satu program yang termasuk didalamnya adalah Arahan Pembaruan Teknologi Informasi. Pemanfaatan teknologi informasi ditujukan sebagai salah satu penunjang penting dalam menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi Pengadilan Agama Padang Panjang dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, sehingga dapat mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Mahkamah Agung RI terus berupaya memanfaatkan teknologi informasi dalam mendorong standardisasi alur kerja dan efisiensi monitoring semua aktivitas agar lebih efektif, efisien dan ekonomis. Penerapan teknologi informasi ditujukan untuk mendorong kebijakan penataan ulang bisnis proses sistem manajemen alur kerja (*work flow management systems*), sistem manajemen hubungan dengan pengguna pengadilan (*customers relations management systems*), dan komunikasi eksternal secara elektronik dengan pencari keadilan, para advokat dan kalangan profesional lainnya, serta masyarakat umum.

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Agama Padang Panjang secara parsial atas inisiatif kepentingan Satker mendayagunakan teknologi informasi (TI) sebagai

sarana dalam memberikan layanan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan.

Sarana teknologi informasi untuk masing-masing satker dilingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Untuk kepemilikan perangkat keras yang ada di Pengadilan Agama Padang Panjang dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Jenis peralatan	Jumlah	Kondisi alat	Keterangan
	Jaringan <i>Local Area Network</i> (LAN)	1	Baik = 1 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
	Server	2	Baik = 1 Rusak Ringan = 1 Rusak Berat = 0	
	Touchscreen/ KIOS-K	2	Baik = 2 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
	Personal Computer (PC) Unit untuk SIPP	34	Baik = 26 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 8	
	Laptop untuk SIPP	26	Baik = 17 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 3	
	TV Media Informasi	2	Baik = 1 Rusak Ringan = 1 Rusak Berat = 0	
	Printer	17	Baik = 12 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 5	
	Scanner	2	Baik = 2 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
	Photocopy	1	Baik = 1 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
	PABX dan pesawat telpon	10	Baik = 10 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
	Wifi atau Hotspot	2	Baik = 2 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	

**Tabel 4-31.** Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi pada Pengadilan Padang Panjang

b. Perangkat lunak (Software) pada Pengadilan Agama Padang Panjang sampai akhir tahun 2021 terdiri dari:

- **Website resmi Pengadilan Agama Padang Panjang**

Dengan mengikuti perkembangan zaman, Pengadilan Agama Padang Panjang juga telah memiliki sebuah portal online yang memberikan informasi seputar Pengadilan Agama Padang Panjang dengan alamat: <https://www.pa-padangpanjang.go.id>, Website resmi ini sudah dibangun sejak tahun 2007 dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman.

- **EMAIL**

Untuk mempermudah transformasi data serta komunikasi elektronik Pengadilan Agama Padang Panjang memiliki akun email resmi yaitu: [pa.padangpanjang@pta-padang.go.id](mailto:pa.padangpanjang@pta-padang.go.id), sehingga komunikasi data elektronik dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

- **KOMDANAS MAHKAMAH AGUNG**

KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional) Mahkamah Agung adalah aplikasi online yang terpusat pada website mahkamah agung ri yang berfungsi untuk memudahkan pengelolaan data di bidang kesekretariatan (umum keuangan, perencanaan dan kepegawaian) sehingga bisa di manfaatkan untuk penyimpanan data di satker sekaligus pengumpulan data oleh pusat.

- **APLIKASI ADMINISTRASI PERKARA**

- SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) adalah aplikasi yang dapat memberikan informasi tentang perkara dengan basis Web, dari penerimaan perkara, persiapan persidangan, proses persidangan, sampai dengan penyelesaian perkara

- Aplikasi Touchscreen Informasi Perkara

Adalah Aplikasi yang terletak dalam media informasi Publik dalam alat *Touch Screen* (Kios-K) dalam menginformasikan tentang proses perkara yang ada di Pengadilan Agama Padang Panjang

- Portal Tabayun, yaitu aplikasi yang dapat membantu mempermudah proses perkara yang para pihak berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang, dimana aplikasi tersebut berada pada website: [www.badilag.net](http://www.badilag.net)

- Informasi Publik dan laporan perkara, yaitu aplikasi yang juga berpusat pada website [www.badilag.net](http://www.badilag.net), yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam memberikan informasi kepada publik tentang perkara.

- Aplikasi E-Court

Merupakan Aplikasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan terhadap Pencari keadilan agar dapat berperkara secara elektronik, yang terdiri dari *e-filing* (Perdaftaran perkara secara online), *e-payment* (Pembayaran panjar biaya secara online), *e-summons* (pemanggilan pihak secara online), yang dapat diakses oleh pencari keadilan melalui alamat: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

- Aplikasi berbasis web SIMPAI

Merupakan salah satu bentuk inovasi dari Pengadilan Agama Padang Panjang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pencari keadilan, aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang digunakan dalam pengambilan akta cerai dimana pada saat pengambilan akta cerai terdapat fitur take picture yang berguna untuk data dukung dalam pengambilan akta cerai. Aplikasi ini akan terus dikembangkan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang terhadap produk pengadilan lainnya.

- Aplikasi Antrian dan Notifikasi Perkara (ATIKA)  
Merupakan Salah satu bentuk inovasi dari Pengadilan Agama Padang Panjang dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Pencari Keadilan, aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang digunakan untuk antrian sidang, pendaftaran perkara, pemberitahuan persidangan untuk masyarakat dan juga pegawai.
- **APLIKASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**
  - SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) untuk memberikan informasi tentang data-data pegawai, semua data yang berhubungan dengan pegawai dapat dilihat di aplikasi SIMPEG yang terintegrasi pada website [www.badilag.net](http://www.badilag.net)
  - SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) untuk memberikan informasi tentang data- data pegawai, semua data yang berhubungan dengan pegawai dan terintegrasi pada website Mahkamah Agung RI.
- **APLIKASI ADMINISTRASI UMUM**
  - Untuk mengelola aset atau Barang Milik Negara Pengadilan Agama Padang panjang juga didukung oleh aplikasi berbasis komputer seperti, SIMAKBMN, Aplikasi Persediaan, SIMANTAP dan lainnya dan sekarang telah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI
  - Khusus pengelolaan aset tanah barang tidak bergerak PA Padang Panjang juga didukung oleh aplikasi Simantap.
- **APLIKASI ADMINISTRASI KEUANGAN**
  - Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
  - Aplikasi Monev Dja (Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Anggaran) Yaitu aplikasi berbasis internet yang berfungsi untuk memantau target penyerapan dan kegiatan dari DIPA Satker.

- Aplikasi Monev PP 39 Bappenas ( Monitoring dan Evaluasi ) Untuk memantau dan melaporkan kegiatan penyerapan anggaran per triwulan.
- Aplikasi Omspan (online monitoring sistem perbendaharaan negara) adalah Aplikasi berbasis WEB yang dapat diakses melalui jaringan Intranet dan Internet yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi SPAN dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan
- Aplikasi Perencanaan
  - Aplikasi SAKTI (Sistem Akuntansi Instansi) modul anggaran yaitu aplikasi online dari kemenkeu yang digunakan dalam menyusun rencana anggaran setiap tahunnya dalam rangka penyusunan DIPA tahun anggaran berikutnya, dan juga aplikasi yang digunakan oleh satker untuk melakukan revisi DIPA, Revisi POK dalam tahun Anggaran berjalan.
  - Aplikasi RKAKL DIPA Online (Satu DJA), aplikasi berbasis internet yang berpusat pada kementerian Keuangan yang digunakan untuk mengajukan revisi DIPA dan mengambil adk revisi yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan.
  - Aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), yaitu aplikasi berbasis internet terpusat pada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah) yang berfungsi untuk mengumumkan rencana Pengadaan Barang dan Jasa dalam Tahun Anggaran berjalan.

### **Implementasi *E-Court* di Lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang**

Secara substansi aplikasi *E-Court* dibuat oleh Mahkamah Agung agar masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan layanan pengadilan yang mudah. Dengan layanan E-court masyarakat mendapatkan efisiensi dalam proses administrasi berperkara di Pengadilan, banyak yang terpangkas dengan aplikasi *E-Court* ini, diantaranya waktu, biaya dan tenaga sehingga sangat menguntungkan bagi para pencari keadilan dan aparaturnya sendiri.



*E-court* adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online (*e-filling*), Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online (*e-payment*) dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (*e-summons*).

Mahkamah Agung terus bergerak mengembangkan aplikasi pengadilan elektronik yang populer dengan sebutan *e-court*. Satu tahun setelah diluncurkan pada tanggal 13 Juli 2018 yang lalu, dan pada tanggal 06 Agustus 2019 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 01 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik peraturan ini merupakan payung hukum dari pengembangan aplikasi *E-Court* dimana aplikasi tersebut kini tengah diperbaharui dengan pengembangan menu persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Menu *e-litigation* dapat diselenggarakan persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan/ bantahan/ perlawanan, penyampaian replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan/ penetapan. “Persidangan yang biasanya dilaksanakan di ruang persidangan sebagian akan dialihkan menjadi persidangan secara elektronik

Pada tahun 2021 penerapan *e-litigation* diwajibkan kepada seluruh pengadilan di Indonesia. Pengadilan Agama Padang Panjang akan sangat mendukung program nasional yang telah diresmikan oleh Wakil Ketua MA RI bidang Yudisial tanggal 19 Agustus 2019 tersebut.

Selama tahun 2022, Pengadilan Agama Padang Panjang telah menerima perkara *E-court* sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) perkara, terdiri dari perkara gugatan sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) perkara *e-court* dan perkara permohonan 25 (dua puluh lima) perkara *e-court*, dari 246 perkara yang masuk melalui *e-court* 6 perkara diselesaikan melalui litigasi atau sebesar 2,5 % dari seluruh perkara *e-court* dan dari 6 perkara yang diselesaikan melalui *e-litigasi* terdapat 2 perkara dengan pengguna terdaftar dan 4 perkara dengan pengguna lainnya

Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara		% e- litigasi	Pengguna Layanan e- Litigasi			
	e-court	e-litigasi		Pengguna Terdaftar	%	Pengguna Lainnya	%
Pengadilan Agama Padang Panjang	246	6	2,5%	2	33%	4	67%

**Tabel 4-32.** Rekapitulasi penerimaan dan penanganan perkara E-Court

No.	Kode & Tanggal Register	Status Pembayaran	Status Pendaftaran	Jumlah Perjan Perkara	Nomor Perkara & Tanggal Pendaftaran
1	PA.PP.01000001/4 Januari 2022	Sudah Dibayar	Pendaftaran	Rp. 400.000	1478-01000001/4 Januari 2022
2	PA.PP.01000002/4 Januari 2022	Sudah Dibayar	Pendaftaran	Rp. 400.000	1478-01000002/4 Januari 2022
3	PA.PP.01000003/5 Januari 2022	Sudah Dibayar	Pendaftaran	Rp. 400.000	1478-01000003/5 Januari 2022
4	PA.PP.01000004/5 Januari 2022	Sudah Dibayar	Pendaftaran	Rp. 400.000	1478-01000004/5 Januari 2022
5	PA.PP.01000005/2 Januari 2022	Sudah Dibayar	Pendaftaran	Rp. 119.000	1478-01000005/2 Januari 2022
6	PA.PP.01000006/3 Januari 2022	Sudah Dibayar	Pendaftaran	Rp. 400.000	1478-01000006/3 Januari 2022
7	PA.PP.01000007/3 Januari 2022	Sudah Dibayar	Pendaftaran	Rp. 400.000	1478-01000007/3 Januari 2022
8	PA.PP.01000008/2 Januari 2022	Sudah Dibayar	Pendaftaran	Rp. 475.000	1478-01000008/2 Januari 2022
9	PA.PP.01000009/2 Januari 2022	Sudah Dibayar	Pendaftaran	Rp. 400.000	1478-01000009/2 Januari 2022
10	PA.PP.01000010/3 Januari 2022	Sudah Dibayar	Pendaftaran	Rp. 400.000	1478-01000010/3 Januari 2022

Perkara E-Court (Gugatan) yang terdaftar di Aplikasi E-Court PA Padang Panjang

No.	Kode & Tanggal Register	Status Pembayaran	Status Pendaftaran	Jumlah Perjan Perkara
1	PA.PP.02000001/3 Januari 2022	Sudah Dibayar	Pendaftaran	Rp. 100.000
2	PA.PP.02000002/18 November 2021	Sudah Dibayar	Pendaftaran - Publikasi Tenggul Publikasi: 1 Desember 2021	Rp. 100.000
3	PA.PP.02000003/11 November 2021	Sudah Dibayar	Pendaftaran - Publikasi Tenggul Publikasi: 25 November 2021	Rp. 100.000
4	PA.PP.02000004/27 Oktober 2021	Sudah Dibayar	Pendaftaran - Publikasi Tenggul Publikasi: 11 November 2021	Rp. 100.000
5	PA.PP.02000005/19 Oktober 2021	Sudah Dibayar	Pendaftaran - Publikasi Tenggul Publikasi: 7 November 2021	Rp. 100.000
6	PA.PP.02000006/13 Oktober 2021	Sudah Dibayar	Pendaftaran - Publikasi Tenggul Publikasi: 7 November 2021	Rp. 100.000
7	PA.PP.02000007/08 September 2021	Sudah Dibayar	Pendaftaran - Publikasi Tenggul Publikasi: 16 Oktober 2021	Rp. 100.000
8	PA.PP.02000008/19 Agustus 2021	Sudah Dibayar	Pendaftaran - Publikasi Tenggul Publikasi: 9 September 2021	Rp. 100.000
9	PA.PP.02000009/3 Agustus 2021	Sudah Dibayar	Pendaftaran - Publikasi Tenggul Publikasi: 24 Agustus 2021	Rp. 100.000
10	PA.PP.02000010/3 Agustus 2021	Sudah Dibayar	Pendaftaran - Publikasi Tenggul Publikasi: 10 Agustus 2021	Rp. 100.000

Perkara E-Court (Permohonan) yang terdaftar di Aplikasi E-Court PA Padang Panjang

## **Implementasi SIPP di Lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang**

Sesuai dengan himbauan Ketua Mahkamah Agung RI bahwa pada 1 Januari 2018 seluruh satker pengadilan harus sudah mengimplementasikan SIPP versi 3.2.0, maka terhitung tanggal tersebut Pengadilan Agama Padang Panjang juga telah mengimplementasikan Aplikasi SIPP versi 3.2.0. Aplikasi SIPP versi 3.2.0 ini memiliki fitur-fitur yang baru dibandingkan versi sebelumnya, yaitu penambahan template putusan, berita acara dan panggilan, tambahan fitur Delegasi Online, serta sudah terintegrasi dengan Aplikasi Direktori Putusan dan Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Administrasi Perkara) di Mahkamah Agung RI.

Sampai dengan bulan Desember 2022, SIPP telah mengalami pengembangan aplikasi dari versi 3.4.0-1 hingga versi 5.1.0. Demikian pula Pengadilan Agama Padang Panjang sampai dengan bulan Desember 2022 juga telah menerapkan SIPP versi 5.1.0 dan penerapannya sudah 100% (mulai dari pendaftaran sampai dengan penerbitan akta cerai), serta sinkronisasi data ke Mahkamah Agung sebanyak minimal 3 kali dalam sehari.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya sebagai Pengadilan Agama, saat ini penggunaan SIPP sebagai alat bantu dalam hal pengadministrasian perkara di Pengadilan Agama Padang Panjang sudah menjadi sebuah kebutuhan.

Seluruh pengguna telah mampu dan terbiasa dalam menggunakan SIPP, kemampuan dasar yang diperlukan untuk mendukung penggunaan SIPP di satker Pengadilan adalah kemampuan menggunakan komputer (PC/Laptop/Notebook). Saat ini, semua stake holder yang terkait dengan pengadministrasian perkara telah mampu menggunakan komputer, dalam hal ini khususnya mengoperasikan aplikasi SIPP sesuai dengan tupoksinya. Bahkan dalam persidangan Hakim sudah dapat langsung memasukkan amar di aplikasi SIPP pada saat sidang dan Panitera Pengganti juga langsung mengisi jadwal tundaan sidang dan data saksi, sehingga ketika masuk sebuah sistem tambahan baru, yaitu E-Court, bagi para pengguna di Pengadilan Agama Padang Panjang bukan lagi menjadi sebuah kendala yang besar.

Dalam hal penerapan SIPP maupun E-Court, Pengadilan Agama Padang Panjang terus berupaya memanfaatkan teknologi informasi melalui dukungan perangkat keras dan perangkat lunak dan sumber daya manusia, untuk mendorong terciptanya pelayanan administrasi perkara yang efektif dan efisien.

Berdasarkan SIPP Pengadilan Agama Padang Panjang tanggal 30 Desember 2022 telah terdaftar sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam ) perkara, dengan rincian 340 perkara Gugatan dan 36 perkara Permohonan. Adapun penyelesaian Perkara yang diselesaikan tahun 2022 sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) perkara, dengan rincian 340 perkara Gugatan dan 36 perkara Permohonan. Dengan demikian terdapat sisa perkara di akhir tahun 2022 sebanyak 4 (empat) perkara Gugatan. Sehingga secara keseluruhan penyelesaian perkara tahun 2022 mencapai 98.95% dengan sisa 1.05%.



# BAB V

# PENINGKATAN

# PELAYANAN PUBLIK

## PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Pelayanan prima ini harus ditingkatkan di seluruh pengadilan terutama pada pelayanan yang masih mendapatkan keluhan publik seperti jadwal sidang, layanan informasi di pengadilan dan pungutan liar.

Area pelayanan publik sudah menjadi fokus dari perubahan yang ingin dilakukan oleh Mahkamah Agung, hal ini tercantum dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2035 Mahkamah Agung, yang di mana pelayanan publik masuk dalam area perubahan nomor 8. Untuk pelayanan publik ini, Mahkamah Agung membuat 5 program reformasi birokrasi yaitu:

1. Standar pelayanan;
2. Budaya pelayanan prima;
3. Pengelolaan pengaduan;
4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan
5. Pemanfaatan teknologi informasi.

Sedangkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebuah bentuk layanan dari pengadilan kepada masyarakat dilakukan bukan saja secara cepat, sederhana dan biaya ringan, transparan dan akuntabel tetapi juga pelayanannya mengacu kepada prinsip yang Efektif, Efisien dan Ekonomis.

## A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Penjaminan Mutu (*quality assurance*) pada dasarnya ialah suatu upaya yang berkelanjutan untuk memastikan tiadanya cacat produk atau layanan, sehingga produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan. Dalam konteks lembaga peradilan, penjaminan mutu berarti upaya pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding untuk memastikan seluruh layanan dan produk-produknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

Akreditasi penjaminan mutu berarti upaya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memastikan penjaminan mutu telah dilaksanakan oleh pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama. *Output* dari penjaminan mutu adalah sertifikat akreditasi. Sedangkan *outcome*-nya adalah meningkatnya kualitas pelayanan, baik pelayanan internal maupun eksternal, sehingga kepuasan penerima layanan juga semakin meningkat.

Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu mengacu pada 7 kriteria *Indonesian Court*:

- 1 Kepemimpinan (Leadership);
- 2 Perencanaan Strategis (Strategic Planing);
- 3 Fokus Pelanggan (Custumor Focus);
- 4 Sistem Dokumen (Document System);
- 5 Manajemen Sumberdaya (Resources Management);
- 6 Manajemen Proses (Process Management); dan
- 7 Hasil Kinerja (Performance Result)

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Padang Panjang telah melaksanakan penilaian akreditasi penjaminan mutu dan mendapatkan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama pada tanggal 1 Maret 2019 dengan nilai "A" (Excellent). Sebagai tindak lanjut dari sertifikasi ini, maka dilaksanakan 3 kali asesmen *surveillance* yang dijadwalkan pada bulan Desember 2019, Desember 2020 dan Desember 2021.

Berbagai persiapan dalam Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Agama Padang Panjang telah dipersiapkan. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan yaitu:

- Penyiapan Dokumen APM
- Pengiriman Dokumen APM ke PTA Padang
- Telusur Dokumen APM oleh PTA Padang
- Pengiriman Hasil Telusur Dokumen APM oleh PTA Padang
- Observasi Implementasi APM
- Pengiriman Hasil Observasi Implementasi APM oleh PTA Padang

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Padang Panjang kembali melakukan Penilaian Ulang / Reakreditasi Penjaminan Mutu melalui aplikasi e-APM dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 4095/DjA.3/HM.OO/9/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Perubahan Kegiatan Asesmen APM Tahun 2022 dinyatakan bahwa Evaluasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2022 dinyatakan tidak diperlukan lagi.

## **B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**

### **1. LATAR BELAKANG PTSP**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang biasa disingkat dengan PTSP adalah merupakan pengejawantahan dari Visi dan Misi Pengadilan Agama Padang Panjang yang di break-down dari Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana Pengadilan Agama Padang Panjang selalu berusaha dan terus menerus berupaya memberikan pelayanan prima dan berkeadilan kepada para pihak / pencari keadilan (Customer Focus).

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap

permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu.

PTSP merupakan perwujudan dari komitmen Pengadilan Agama Padang Panjang dengan semua jajarannya, dimulai dari pintu masuk sampai dengan pintu keluar terkait dengan core business maupun process business yang mesti dilakukan bukan saja secara cepat, sederhana dan biaya ringan, transparan dan akuntabel tetapi juga pelayanannya mengacu kepada prinsip yang Efektif, Efisien dan Ekonomis.

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor :1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor : W3-A8/39/OT.01.3/1/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Padang Panjang, maka jenis-jenis layanan peradilan yang masuk ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) tersebut, meliputi :

#### 1. LAYANAN POKOK PTSP

- a. Layanan Permohonan Informasi
- b. Layanan Pendaftaran Perkara
- c. Layanan Pembayaran Perkara
- d. Layanan Antrian Persidangan
- e. Layanan Penyerahan Produk Pengadilan
- f. Layanan Penerimaan Pengaduan

#### 2. LAYANAN PENUNJANG PTSP

- a. Layanan Pemberian Bantuan Hukum
- b. Layanan Penerimaan Pembayaran Panjar Biaya Perkara



### 3. LAYANAN PENUNJANG PTSP OLEH PIHAK EKSTERNAL

- a. Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
- b. Bank
- c. TV Media
- d. CCTV

## 2. SARANA DAN PRASARANA PTSP

Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Padang Panjang



Dari kiri ke kanan (1) Layanan Penyerahan Produk Pengadilan, (2) Layanan Informasi dan Pengaduan, (3) Layanan Pendaftaran Perkara dan Pojok E-Court



Layanan pembayaran biaya perkara



Standar layanan pada area PTSP PA Padang Panjang



Monitor Informasi Perkara



Ruang Tunggu Sidang

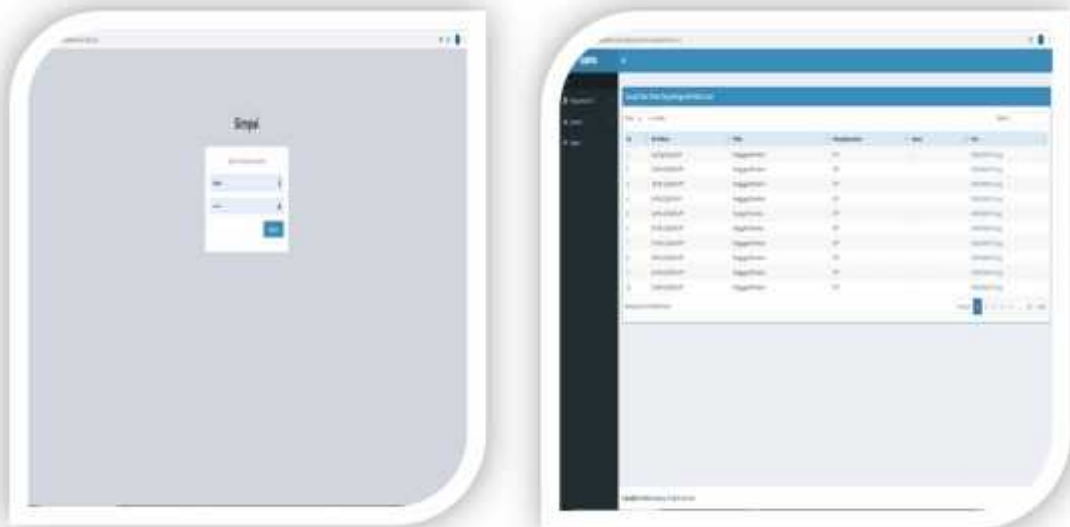
## C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/ KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Badan Peradilan di bawahnya secara parsial atas inisiatif kepentingan masing-masing Satker mendayagunakan teknologi informasi (TI) sebagai sarana dalam memberikan layanan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan.

Pada tahun 2022 ada 9 inovasi yang telah diimplementasikan di Pengadilan Agama Padang Panjang. Adapun sembilan aplikasi itu:

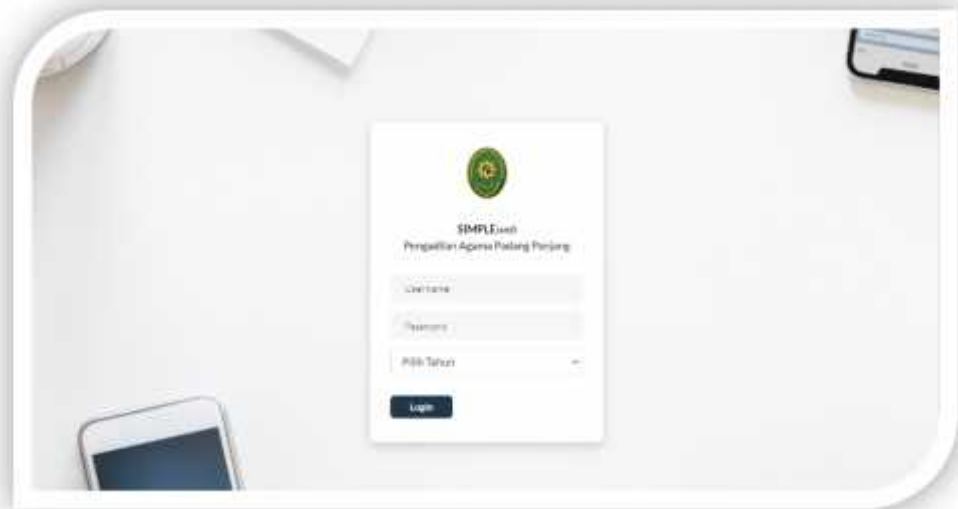
### 1. Aplikasi SIMPAI

Merupakan aplikasi yang digunakan dalam pengambilan akta cerai dimana pada saat pengambilan akta cerai terdapat fitur take picture yang berguna untuk data dukung dalam pengambilan akta cerai. Aplikasi ini akan terus dikembangkan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang terhadap produk



## 2. Aplikasi Simple

Merupakan aplikasi untuk mengelola persuratan di Pengadilan Agama Padang Panjang. Dengan aplikasi ini pengelolaan persuratan dengan menggunakan Teknologi Informasi.



## 3. Aplikasi Antrian dan Notifikasi Perkara (ATIKA)

Merupakan salah satu bentuk inovasi dari Pengadilan Agama Padang Panjang dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Pencari Keadilan, aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang digunakan untuk antrian sidang, pendaftaran perkara, pemberitahuan persidangan untuk masyarakat dan juga pegawai.



#### 4. Aplikasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Online

Merupakan salah satu bentuk inovasi dari Pengadilan Agama Padang Panjang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Pencari Keadilan, dimana aplikasi ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat setelah menerima layanan dari Pengadilan Agama Padang Panjang.



#### 5. Aplikasi Survey Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Korupsi

Merupakan aplikasi untuk melakukan survey terhadap pengguna layanan Pengadilan secara online sehingga menghemat pemakaian kertas.



**SURVEI**  
**PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI**  
 Pengadilan Agama Padang Panjang  
 Data Masyarakat (Responden)

Nama Responden\*   
 Jenis Kelamin\*  Laki-Laki  Perempuan  
 Pendidikan Terakhir\*   
 Pekerjaan Utama\*   
 Nama Instansi/Instansi Tempat Bekerja/Beraktivitas\*\*   
 Untuk Pihak Sapa Sapa/itu Menggunakan Layanan\*

**6. Aplikasi SIAPPA (Sistem Informasi Aplikasi PA Padang Panjang)**

Merupakan aplikasi berupa portal yang digunakan untuk memudahkan pegawai dalam melihat seluruh Aplikasi dan Inovasi yang sedang berjalan di PA Padang Panjang



**7. Inovasi MENDUNG SESAAT (Pelayanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan Langsung Selesai Setelah Putusan Perceraian)**

Merupakan inovasi berupa pelayanan terintegrasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dengan Pengadilan Agama Padang Panjang dimana Dokumen Kependudukan (KK & KTP) bisa langsung selesai setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap (*incracht*) bagi masyarakat Padang Panjang.



#### **8. Inovasi SARI MADU LEBAH (Setelah Bercerai Dokumen Kependudukan Langsung Berubah)**

Merupakan Inovasi berupa pelayanan terintegrasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar dengan Pengadilan Agama Padang Panjang dimana Dokumen Kependudukan (KK & KTP) bisa langsung selesai setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap (*incracht*) bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar.



### 9. Inovasi SIPUTARPAT (Setelah Bercerai Dokumen Kependudukan Langsung Berubah)

Merupakan Inovasi dalam rangka memudahkan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Padang Panjang dalam perceraian. Setelah putusannya berkekuatan hukum tetap, Akta Cerai para pihak dapat diantarkan ke Kantor Lurah/Wali Nagari tempat domisili Para Pihak tersebut berada.





Disamping 9 inovasi yang telah diimplementasikan, Pengadilan Agama Padang Panjang juga telah mengimplementasikan aplikasi unggulan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 9 aplikasi unggulan Badilag berawal dari tindak lanjut peluncuran sistem E-litigasi oleh Ketua Mahkamah Agung pada 19 Agustus 2019 lalu. Dan pada tahun 2022 telah menjadi 22 aplikasi unggulan di mana pada tahun 2022 ini ada penambahan aplikasi unggulan dari Direktorat Jenderal Peradilan Agama yaitu: *Access CCTV Online (ACO)*. 9 titik CCTV Pengadilan Agama Padang Panjang telah terhubung pada aplikasi *Access CCTV Online (ACO)*.

Aplikasi yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI ini dalam rangka mewujudkan misi keempat dalam Cetak Biru Pembaharuan Badan Peradilan 2010-2035, yakni meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Telah dilakukan pemasangan CCTV pada seluruh satuan kerja di bawahnya secara terpusat dan terkoneksi pada satu titik akses melalui Aplikasi *Access CCTV Online (ACO)* Ditjen Badilag pada laman website <https://cctv.badilag.net>. Dengan adanya aplikasi *Access CCTV Online (ACO)* juga merupakan bentuk pengawasan secara berjenjang terhadap kemungkinan terjadinya praktik-praktik suap, gratifikasi, dan lain sejenisnya yang dapat menurunkan citra dan wibawa badan peradilan. Serta monitoring disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas pada jam kerja dan melaksanakan apel senin pagi dan jum'at sore setiap minggu, dan juga evaluasi konsistensi dalam implementasi standar jaminan mutu, baik penerapan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan & Santun) dalam melayani masyarakat maupun implementasi 5RIN (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin, Indah & Nyaman) sesuai dengan standar jaminan mutu yang telah ditetapkan.

**Adapun aplikasi unggulan Badilag yang diluncurkan diantaranya :**

1. Aplikasi notifikasi perkara
2. Aplikasi informasi perkara dan informasi produk pengadilan agama
3. Aplikasi antrian sidang
4. Aplikasi verifikasi data kemiskinan (kerja sama dengan AIPJ dan TNP2K)

5. Command Centre Badilag
6. Aplikasi e- eksaminasi
7. Aplikasi PNBP
8. E-register perkara
9. E-keuangan perkara
10. Aplikasi Validasi Akta Cerai
11. Aplikasi Gugatan Mandiri
12. Aplikasi Virtualisasi Surat Izin Online (Vision+)
13. Aplikasi Access CCTV Online (ACO)
14. Aplikasi Buku Tamu Digital
15. Penilaian kinerja Satker
16. Portal Aplikasi SIMTALAK

Semenjak diluncurkannya 22 inovasi tersebut, Pengadilan Agama Padang Panjang bergerak cepat untuk dapat segera mengimplementasikan 23 inovasi Badilag tersebut, sampai tahun 2022 Pengadilan Agama Padang Panjang telah berhasil menginstal dan menggunakan 22 inovasi tersebut, dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, di tahun 2022 Pengadilan Agama Padang Panjang menandatangani 7 (tujuh) Perjanjian Kerja Sama / *Memorandum of Understanding* (MoU) yaitu:

**1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar**

Inovasi berupa pelayanan terintegrasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar dengan Pengadilan Agama Padang Panjang dimana Dokumen Kependudukan bisa langsung selesai setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap (*incracht*) bagi masyarakat Tanah Datar.

**2. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat**

Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam membangun jejaring kerja antara para pihak di bidang *access to justice and justice for all* sehingga masyarakat

pencari keadilan semakin luas dan mudah mengetahui, memahami serta memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Pengadilan Agama Padang Panjang.



### 3. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam optimalisasi sinergi di bidang pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar.



### 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar

Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dengan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam pemberian layanan pemeriksaan kesehatan dan edukasi kesiapan fisik dan mental dalam permohonan perkara dispensasi perkawinan bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

#### **5. Pemerintah Kota Padang Panjang**

Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam optimalisasi sinergi di bidang pelayanan publik bagi masyarakat Kota Padang Panjang.



#### **6. Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang**

Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dengan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam pemberian layanan pemeriksaan kesehatan dan edukasi kesiapan fisik dan mental dalam permohonan perkara dispensasi perkawinan bagi masyarakat Kota Padang Panjang.

#### **7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang**

Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dengan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam

penayangan berita pada Padang Panjang TV dan penayangan video informasi hukum dan produk pelayanan Pengadilan Agama Padang Panjang pada videotron yang ada di wilayah Kota Padang Panjang.





# BAB VI

## PENGAWASAN

### A. INTERNAL

Dalam rangka untuk mengaudit, mereviu, serta mengevaluasi capaian sebuah organisasi/ instansi diperlukan pengawasan dan evaluasi, sebagai sebuah lembaga negara maka secara internal Mahkamah Agung RI sendiri kegiatan pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.

Agar organisasi dapat berjalan dan berkesinambungan di dalam lingkungan peradilan, maka pengawasan internal dikenal 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Untuk menegakkan dan menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap Pengadilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan

Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dan Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

**a. Kehadiran didasarkan kepada *finger print* untuk pembayaran remunerasi dan uang makan**

- 1) Hakim dan Pegawai wajib mematuhi ketentuan mengenai disiplin kerja sesuai dengan ketentuan jam kerjanya.
- 2) Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab terhadap dipatuhinya dan dilaksanakannya disiplin kerja hakim di Pengadilan yang dipimpinnya.
- 3) Hari Kerja mulai hari senin sampai dengan hari jum'at.
- 4) Jam Kerja dan Jam istirahat bagi hakim dan pegawai diatur sebagai berikut:

**Jam Kerja:**

- a) Hari Senin s/d Kamis dari pukul 08.00 s/d pukul 16.30 waktu setempat
- b) Hari Jum'at dari pukul 08.00 s/d pukul 17.00 waktu setempat.

**Jam istirahat:**

- a) Hari Senin s/d Kamis dari pukul 12.00 s/d pukul 13.00 waktu setempat.
  - b) Hari Jum'at dari pukul 12.00 s/d pukul 13.30 waktu setempat.
- 5) Daftar Hadir dan Daftar pulang dilingkungan Pengadilan dilaksanakan melalui mesin (finger scan/mesin kartu) dan manual.
  - 6) Daftar hadir/pulang dibuat sesuai lampiran I Perma Nomor 7 Tahun 2016.
  - 7) Ijin keluar kantor dibuat sesuai lampiran II Perma Nomor 7 Tahun 2016.
  - 8) Ijin tidak masuk kerja sesuai dengan Lampiran III Perma 7 Nomor Tahun 2016.
  - 9) Daftar hadir menjadi dasar untuk mengusulkan dalam pembayaran remunerasi dan uang makan serta uang transportasi hakim.



- 10) Disetiap Pengadilan ditunjuk seorang petugas daftar hadir & daftar pulang dengan tugas pada setiap akhir bulan merekap dan melaporkan melalui aplikasi komunikasi data nasional.
- 11) Atasan langsung sesuai pasal 2 Perma Nomor 8 tahun 2016, wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di dalam maupun di luar kedinasan secara terus menerus.
- 12) Pengawasan perilaku bawahan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a Perma 8 tahun 2016 dengan memantau ketaatan bawahan atas disiplin kerja yang ditetapkan dan ketaatan atas kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku, merekomendasikan tindak lanjut kepada atasannya secara berjenjang dalam hal tindak lanjut yang diperlukan di luar kewenangannya.

**b. Ijin keluar kantor**

- 1) Hakim dan pegawai bisa meninggalkan kantor untuk keperluan dinas setelah mendapat ijin tertulis dari atasannya langsung, dan setelah kembali melapor ke pimpinan
- 2) Hakim dan Pegawai dilarang meninggalkan kantor pada jam kerja Pengadilan dan pada jam istirahat tanpa ijin tertulis dari atasan langsung, dan setelah kembali ke kantor harus melaporkan jam kembali, yang ditandai dengan catatan di dalam surat ijin oleh atasan langsung dan dicatat dalam buku kendali.
- 3) Pada saat Hakim dan Pegawai berada diluar kantor pada jam kantor dan jam istirahat kecuali untuk kepentingan dinas dengan ijin atau tanpa ijin dari atasan langsung, dilarang menggunakan pakaian dan atribut kantor Pengadilan.
- 4) Hakim dan pegawai Pengadilan pada jam kerja dilarang memasuki tempat tempat hiburan dan tempat belanja selain untuk kepentingan dinas kantor.



Dalam rangka melaksanakan pengawasan internal Pengadilan Agama Padang Panjang telah membentuk Tim Hawasbid berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/63/PS.01/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas Bidang dan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/35/PS.01/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama/ Nip	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim	Bidang Pengawasan	KET
1	Agus Sopyan, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	Koordinator		
2	Ranti Rafika Dewi, S.H.	Hakim	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen Peradilan</li> <li>• Administrasi Perkara</li> <li>• Administrasi Persidangan dan pelaksanaan Putusan</li> </ul>	
3	Rifazul Azdmi, S.H.I.	Hakim	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi Umum</li> <li>• Program Prioritas Badilag</li> <li>• 26 Aplikasi Unggulan Badilag</li> <li>• Kinerja Pelayanan Publik</li> <li>• Mediasi</li> </ul>	

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan meliputi bidang :

1. Manajemen peradilan;
2. Administrasi Perkara;
3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan;
4. Program prioritas Badilag;
5. 26 Aplikasi Unggulan Badilag
6. Administrasi Umum;

7. Kinerja Pelayanan Publik;
8. Mediasi

Pengawasan internal oleh Pengadilan Agama Padang Panjang dilakukan dengan 1 (satu) sistem pengawasan, yaitu pengawasan dan pembinaan langsung ke obyek dan telah dilaksanakan Pengawasan internal dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

### **1. Pengawasan Melekat (WASKAT)**

Pengawasan dari atasan langsung terhadap bawahannya, baik secara preventif maupun represif, agar pelaksanaan tugas bawahan itu berjalan sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan secara rutin setiap bulan dan secara berkala, di samping itu juga dilakukan dengan cara mengadakan rapat-rapat rutin/berkala, rapat pimpinan dan musyawarah setiap permasalahan yang timbul serta mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas pokok peradilan.

### **2. Hakim Pembinaan dan Pengawasan Bidang (HakimBINWASBID)**

Hakim-Hakim BINWASBID melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara berkala 1x 3 bulan atau 4 kali dalam satu tahun yaitu:

- Triwulan I dilaksanakan pada bulan Januari s.d Maret 2022
- Triwulan II dilaksanakan pada bulan April s.d Juni 2022
- Triwulan III dilaksanakan pada bulan Juli s.d September 2022
- Triwulan IV dilaksanakan pada bulan Oktober s.d Desember 2022

Pengawasan dilakukan sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang, hasil temuan pengawasan dilaporkan oleh Hakim Pengawas Bidang kepada pimpinan melalui Wakil Ketua selaku koordinator pengawasan setiap 3 (tiga) bulan dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh masing-masing pegawai sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

### 3. Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan PTA Padang

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang juga dilakukan 1 (satu) system pengawasan yaitu pengawasan dan pembinaan langsung, pada tahun anggaran 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melakukan beberapa kali pengawasan ke Pengadilan Agama Padang Panjang diantaranya:

- Pembinaan dan Pengawasan Reguler PTA Padang

Pembinaan dan pengawasan reguler PTA Padang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2022 dan 25 Mei 2022. Sesuai dengan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor: W3-A/1473/PS.00/V/2022 tanggal 23 Mei 2022. Tim terdiri dari 4 orang, yaitu Drs. H. Amridal, S.H., M.A. (Hakim Tinggi), Drs. Abd Khalik, S.H., M.H., (Panitera), Rahmita, S.Ag., (Panitera Pengganti), Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H., (Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga), Feri Hidayat (PPNPN).



- Monitoring dan Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan PTA Padang  
Monitoring dan evaluasi hasil pembinaan dan pengawasan dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2022 dan 28 Oktober 2022 di Pengadilan Agama Padang Panjang. Tim Monitoring ini diketuai oleh Drs. Najamuddin, S.H., M.H., (Hakim Tinggi), H.Idris Latif, S.H., M.H., (Sekretaris), dan Drs. Daryamurni (Panitera Pengganti).



## B. EVALUASI

Pengawasan sebagai sub-sistem dari sistem manajemen telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dana yang tersedia. Pengawasan internal dari sisi Pengadilan Agama Padang Panjang meliputi pengawasan dan pembinaan di bidang tupoksi serta pengawasan melekat. Pengawasan dan pembinaan pada masing-masing bidang dilaksanakan 4 kali.

Khusus pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsungnya juga terlaksana secara rutin dan hasilnya cukup baik, karena terkait dengan disiplin pegawai yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan untuk hakim diatur oleh Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Evaluasi terhadap kinerja masing-masing hakim dan pegawai dilakukan secara rutin dalam bentuk evaluasi PKP bulanan, evaluasi LLK dan juga rapat bulanan, dimana Ketua, Panitera dan Sekretaris membuat rekapitulasi capaian penyelesaian pekerjaan dan menyampaikan dalam rapat tersebut, seperti halnya:

1. Presentase penyelesaian perkara oleh masing-masing majelis per bulan.
2. Presentase penyelesaian perkara 0 s/d 3 bln dan < 5 bln serta di atas 5 bln.
3. Presentase perkara putus yang telah diminutasi 0 s/d 7 hari, 8 s/d 14, dan < 1 bln.
4. Penyelesaian BAS oleh Panitera Pengganti ( sebelum sidang berikutnya).
5. Presentase perkara putus yang masuk arsip (arsip aktif atau arsip statis).
6. Presentase Putusan yang telah dianonimisasi dan telah diupload pada direktori putusan Mahkamah Agung RI.
7. Update Simpeg, SIKEP, Simak BMN, Komdanas, Monev Bappenas, SMART DJA
8. Monitoring Mon SAKTI, OM SPAN, dan IKPA
9. Capaian realisasi anggaran DIPA 01 maupun DIPA 04.
10. Upload data perkara pada SIPP

Pada tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang dan juga Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI juga melakukan pengawasan secara online dengan menggunakan teknologi IT, maupun secara manual offline. Sehingga setiap hari baik pimpinan maupun Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang dapat segera mengetahui perkembangan dan jalannya peradilan, apakah itu menyangkut perkara, biaya perkara, jadwal sidang, putusan dan administrasi perkara lainnya, begitu juga di bidang administrasi umum Pengadilan Agama tidak lepas dari pengawasan

Pengadilan Agama Padang Panjang. Bahwa seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Padang Panjang selalu berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas masing-masing dan evaluasi terhadap fungsi pengadilan terus dilakukan.

Dari uraian tersebut di atas, secara umum pengawasan internal telah dilaksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya, walaupun mungkin masih belum sempurna. Untuk itu Pengadilan Agama Padang Panjang telah memberikan penghargaan (*reward*) kepada pegawai yang berprestasi dan memberikan sanksi (*punishment*) kepada pegawai yang melanggar aturan.



# BAB VII PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dapat di tarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pengadilan Agama Padang Panjang telah melaksanakan tugas secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana strategis dan program kerja yang telah ditetapkan dan mengacu pada standar pelayanan peradilan.
2. Tingkat capaian penyelesaian perkara pada tahun 2022 adalah sebesar 372 Perkara dari total 376 Perkara atau sebesar 99% dan sisa Perkara pada tahun 2022 ini sebanyak 4 perkara..
3. Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2022 telah melaksanakan program e-litigation sesuai petunjuk PERMA nomor 3 Tahun 2018 tentang pendaftaran perkara melalui system elektronik serta 22 program unggulan Dirjen Badilag berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dengan tertib dan konsisten
4. Realisasi Anggaran DIPA 005.01 tahun 2022 sebesar Rp. 3,566,696,385 dari total anggaran sebesar Rp. 3.589.927.000 atau sebesar 99,35%.
5. Realisasi Anggaran DIPA 005.04 tahun 2022 sebesar Rp. 76.150.000 dari total anggaran sebesar Rp. 78.250.000 atau sebesar 97,32%.
6. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi teknis yudisial maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan efektif.

## B. REKOMENDASI

1. Dalam meningkatkan kompetensi Pegawai dalam bidang teknis fungsional dan struktural, agar pegawai Pengadilan Agama Padang Panjang di beri kesempatan untuk mengikuti bimbingan dan pembinaan secara berkala merata guna kelancaran tugas.
2. Untuk peningkatan kinerja penyelesaian perkara perlu disiapkan manajemen pengelolaan perkara yang handal.
3. Perlu adanya pengawasan yang berkelanjutan untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Padang Panjang dalam rangka monitoring dan evaluasi program kerja yang telah di canangkan
4. Untuk mengejar kebutuhan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan pengadilan di bidang ekonomi Syariah, agar Pengadilan Agama Padang Panjang diberi kesempatan untuk menyelenggarakan Forum Discussion Group (FDG) Teknis ekonomi Syariah serta penyediaan anggarannya.



## Lampiran

Form C.1

### REKAPITULASI PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG PENGADILAN AGAMA : PADANG PANJANG

NO	KEGIATAN	DANA YANG TERSEDIA	DANA YANG TERSERAP	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					
	N	I	H	I	L

**Catatan:**

1. Nomor urut;
2. Jenis kegiatan pengadaan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana gedung seperti Pagar, Landscape, pembangunan gedung kantor, rumah dinas, pos jaga dan lain-lain;
3. Dana yang tersedia dalam DIPA yang dialokasikan untuk pekerjaan/kegiatan point 2 diatas;
4. Dana yang terserap atau digunakan pada saat realisasi anggaran, sudah termasuk biaya pembentuk pengadaan tersebut seperti biaya proses pengadaan, honor, perjalanan dinas dan lain-lain yang dikeluarkan untuk membentuk aset tersebut;
5. Perbandingan dari dana yang tersedia (3) dengan dana yang terserap (4);
6. Jika ada penjelasan tambahan seperti pekerjaan masih belum selesai, terjadi kendala pelaksanaa, gagal konstruksi dan lain-lain.
7. Jika tidak ada pengadaan, maka cukup di buat nihil.

**REKAPITULASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG  
PENGADILAN AGAMA : PADANG PANJANG**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT YANG DIHASILKAN</b>	<b>ANGGARAN YANG DIGUNAKAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	5
1	Pemeliharaan gedung kantor	Terlaksananya perawatan gedung kantor dan terciptanya kondisi gedung kantor yang layak pakai dan aman	131.947.400,-	
2	Pemeliharaan halaman gedung kantor	Terlaksananya perawatan halaman gedung kantor dan terciptanya halaman gedung kantor yang indah dan asri	19.993.500,-	
3	Pemeliharaan rumah dinas kantor	Terlaksananya perawatan rumah dinas kantor dan terciptanya kondisi rumah dinas kantor yang layak pakai dan aman	28.025.250,-	

Catatan:

1. Nomor urut;

2. Jenis kegiatan pemeliharaan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana gedung seperti Pagar, Lansecap, pembangunan gedung kantor, rumah dinas, pos jaga dan lain-lain;
3. Output yang dihasilkan secara detail tentang pelaksanaan kegiatan tersebut;
4. Dana yang terserap atau digunakan pada saat realisasi anggaran, sudah termasuk biaya pembentuk pemeliharaan tersebut seperti biaya proses pengadaan, honor, perjalanan dinas dan lain-lain yang dikeluarkan untuk membentuk aset tersebut (jika ada);
5. Jika ada penjelasan tambahan seperti pekerjaan masih belum selesai, terjadi kendala pelaksanaa, gagal konstruksi dan lain-lain.
6. Jika tidak ada pengadaan, maka cukup di buat nihil.

**REKAPITULASI PENGADAAN FASILITAS GEDUNG**  
**PENGADILAN AGAMA : PADANG PANJANG**

NO	KEGIATAN	OUTPUT	DANA YANG TERSERAP	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	Tersedianya 4 (empat) PC Kepaniteraan	54.000.000	
		Tersedianya 2 (dua) unit printer	10.000.000	

## Catatan:

1. Nomor urut;
2. Jenis kegiatan pengadaan yang berhubungan dengan Fasilitas gedung seperti Meubelair, peralatan dan mesin, Gorden/vertikal blind, dan lain-lain tidak termasuk kendaraan bermotor;
3. Output yang dihasilkan secara detail dan terperinci dari jenis barang dan jumlah/kuantitas dari output tersebut;
4. Dana yang terserap atau digunakan pada saat realisasi anggaran, sudah termasuk biaya pembentuk pengadaan tersebut seperti biaya proses pengadaan, honor, perjalanan dinas dan lain-lain yang dikeluarkan untuk membentuk aset tersebut. Nilai dana cukup mewakili secara keseluruhan dari nilai kegiatan. BUKAN per output;
5. Jika ada penjelasan tambahan seperti pekerjaan masih belum selesai, terjadi kendala pelaksanaa, masih ada kekurangan dana untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan lain-lain.
6. Jika tidak ada proses pengadaan, maka cukup dibuat nihil.

**REKAPITULASI PEMELIHARAAN FASILITAS GEDUNG**  
**PENGADILAN AGAMA : PADANG PANJANG**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>DANA YANG TERSERAP</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	5
1	Pemeliharaan Inventaris	Terlaksananya perawatan inventaris dengan baik sehingga fungsinya dapat digunakan semaksimal mungkin	2.279.100,-	
2	Pemeliharaan Laptop	Terlaksananya perawatan laptop dengan baik sehingga fungsinya dapat digunakan semaksimal mungkin	3.596.900,-	
3	Pemeliharaan Komputer	Terlaksananya perawatan komputer dengan baik sehingga fungsinya dapat digunakan semaksimal mungkin	4.184.000,-	
4	Pemeliharaan Printer	Terlaksananya perawatan printer dengan baik sehingga fungsinya dapat digunakan semaksimal mungkin	2.138.100,-	

Catatan:

1. Nomor urut;
2. Jenis kegiatan pemeliharaan yang berhubungan dengan Fasilitas gedung seperti perbaikan komputer, printer, laptop, photocopy, genset, meubelair, dan lain-lain tidak termasuk kendaraan bermotor;
3. Output yang dihasilkan secara detail tentang pelaksanaan kegiatan tersebut;
4. Dana yang terserap atau digunakan pada saat realisasi anggaran, sudah termasuk biaya pembentuk pemeliharaan tersebut seperti biaya proses pengadaan, honor, perjalanan dinas dan lain-lain yang dikeluarkan untuk membentuk aset tersebut (jika ada);
5. Jika ada penjelasan tambahan seperti pekerjaan masih belum selesai, terjadi kendala pelaksanaa, masih ada kekurangan dana untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan lain-lain.
6. Jika tidak ada proses pengadaan, maka cukup dibuat nihil.

REKAPITULASI KEPEMILIKAN PERALATAN PENDUKUNG IT (*INFORMATION TEKHNOLGY*)

## PENGADILAN AGAMA : PADANG PANJANG

NO	JENIS PERALATAN	Jumlah	Kondisi Alat	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Jaringan <i>Local Area Network</i> (LAN)	1	Baik	
2	Server	1	Baik	
3	Touchscreen/ KIOS-K	1	Baik	
4	Personal Computer (PC) Unit	31	19 (sembilan belas) unit dalam keadaan baik dan (8) delapan dalam keadaan rusak rusak	Sangat dibutuhkan tambahan PC Unit sebanyak 10 (sepuluh) untuk mendukung kelancaran tugas
5	Laptop	26	17 (tujuh belas) unit dalam keadaan baik dan 3 (tiga) unit dalam keadaan rusak berat	Masih dibutuhkan tambahan Laptop sebanyak 4 (empat) untuk mendukung kelancaran tugas
6	CCTV	12	12 (dua belas) unit dalam keadaan baik	
7	TV MEDIA INFORMASI	2	1 (Satu) unit baik, dan 1 (satu) unit rusak	
8	Printer	19	10 (sepuluh) unit baik dan 5 (lima) unit dalam keadaan rusak berat	Sangat dibutuhkan tambahan printer sebanyak 10 (sepuluh) unit untuk mendukung kelancaran tugas
9	Scanner	2	Baik	
10	Photocopy	1	Rusak Berat	
11	PABX dan pesawat telpon	16	Baik	
12	Wifi atau Hotspot	2	Baik	

## Catatan:

1. Nomor urut;
2. Jenis peralatan yang dimiliki;
3. Jumlah peralatan yang dimiliki, jika tidak ada buat nilai "0" atau tanda "-";

4. Kondisi alat pada saat akhir tahun pelaporan. Jika jumlah alat banyak, detailkan berapa jumlah kondisi yang berfungsi baik dan berapa yang rusak;
5. Jika ada keterangan tambahan bahwa masih dibutuhkan tambahan alat sebanyak berapa buah untuk mendukung tupoksi.



## REKAPITULASI KEPEMILIKAN ALAT TRANSPORTASI

### PENGADILAN AGAMA : PADANG PANJANG

NO	Jenis Kendaraan	Merk Type kendaraan	Tahun Perolehan	Kondisi Kendaraan	Peruntukan Kendaraan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Kendaraan Dinas Roda 4	Toyota/ Kijang Innova E	2006	Baik	Digunakan untuk operasional Pimpinan	
2	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda/ Supra X 125	2006	Baik	Digunakan untuk operasional	
		Honda/ Mega Pro CW 1600	2007	Baik	Digunakan untuk operasional	
		Honda/ Mega Pro CW 1600	2008	Baik	Digunakan untuk operasional	
		Honda/ Mega Pro CW 1600	2008	Baik	Digunakan untuk operasional	

**Catatan:**

1. Nomor urut;
2. Jenis kendaraan yang dimiliki sesuai dengan jenisnya apakah kendaraan roda 4 atau roda 2;
3. Merk mesin seperti toyota, honda, suzuki dan lain-lain, typenya adalah jenis detil seperti kijang innova, sedan altis, supra x, mega pro dan lain-lain ;
4. Tahun diperolehnya kendaraan dinas tersebut;
5. Kondisi kendaraan pada saat pelaporan;
6. Digunakan untuk apa seperti kendaraan dinas jabatan atau kendaraan operasional perkatoran;
7. Jika ada keterangan lain yang ingin disampaikan untuk mendukung data kendaraan tersebut.

**REKAPITULASI KEPEMILIKAN APLIKASI SOFTWARE PENUNJANG TUPOKSII  
PENGADILAN AGAMA : PADANG PANJANG**

<b>NO</b>	<b>Jenis Aplikasi</b>	<b>Bagian yang memanfaatkan aplikasi</b>	<b>Riview singkat Kegunaan Aplikasi</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	5
1	Aplikasi Website	Administrator dan Pegawai Pengadilan Agama Padang Panjang	Aplikasi website difungsikan oleh salah seorang administrator yang mengelola dan mengontrol perkembangan aplikasi tersebut. Kegunaan dari aplikasi tersebut adalah untuk memberikan informasi kepada publik tentang profil, sejarah, perkembangan dan proses perkara demi menunjang pelayanan publik yang prima.	
2	Aplikasi SIPP	Administrator dan Pegawai Pengadilan Agama Padang Panjang	Kegunaan Aplikasi SIPP sangat penting sekali terutama dalam penyelesaian perkara. Kegunaan dari aplikasi tersebut adalah agar proses penyelesaian perkara mulai dari perkara masuk sampai diputus dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu	
3	Aplikasi SIADPA	Pegawai Pengadila Agama Padang Panjang	Kegunaan Aplikasi SIADPA sangat penting sekali terutama dalam penyelesaian perkara. Kegunaan dari aplikasi tersebut adalah agar proses penyelesaian perkara mulai dari perkara masuk sampai diputus dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu	
4	Aplikasi Antrian Sidang	Admin dan petugas meja informasi	Adapun kegunaan dari aplikasi tersebut adalah supaya terciptanya tertib administrasi dan tertib antrian dalam proses persidangan pihak-pihak yang berperkara.	
5	Aplikasi Perpustakaan	Kepala Sub Bagian Umum dan keuangan dan Operator	Kegunaan aplikasi tersebut adalah agar buku-buku perpustakaan dapat di kelola dengan baik, rapi dan tertib. Sehingga tidak terdapat kesalahan dalam pencatatan, peminjaman, pengembalian dan pengelolaan buku-buku perpustakaan.	
6	Aplikasi Surat Masuk dan Keluar	Kepala Sub Bagian Umum dan keuangan dan Operator	Kegunaan aplikasi tersebut adalah agar surat-surat masuk dan keluar dapat tercatat dengan baik dan menunjang kelancaran alur persuratan. Surat-surat masuk dan keluar dapat discan sehingga dapat diarsipkan dengan baik.	

6	Aplikasi Aset Tetap (Sakti)	Kepala Sub Bagian Umum dan keuangan dan Operator	Kegunaan aplikasi tersebut adalah agar barang-barang milik negara dapat terkontrol dengan baik. Dalam aplikasi ini, semua barang-barang milik negara di inventarisasi secara lengkap dan akurat sehingga barang-barang tersebut dapat dipertanggung jawabkan.	
7	Aplikasi Persediaan (Sakti)	Kepala Sub Bagian Umum dan keuangan dan Operator	Kegunaan aplikasi tersebut adalah agar barang-barang yang habis pakai yang berhubungan dengan keperluan dan konsumsi perkantoran dapat dikelola dengan baik.	
8	Aplikasi Pelaporan (GLP)	Kepala Sub Bagian Umum dan keuangan dan Operator	Kegunaan aplikasi tersebut adalah untuk mencatat setiap transaksi keuangan DIPA	
9	Aplikasi GPP	Pejabat Pembuat Anggaran Belanja Pegawai	Kegunaan aplikasi tersebut adalah untuk membuat daftar amprah gaji, uang makan, rapel pegawai yang diusulkan ke KPPN Bukittinggi	
10	Aplikasi Pembayaran (Sakti)	Pejabat Pembuat dan Penanda tangan SPM	Kegunaan aplikasi tersebut adalah untuk membuat surat perintah membayar pada setiap pengajuan transaksi keuangan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	
11	Aplikasi SIMARI	Bendahara Penerima	Kegunaan aplikasi tersebut adalah untuk mencatat segala transaksi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), baik dalam hal pencatatan maupun dalam hal pelaporan	
12	Aplikasi Bendahara (Sakti)	Bendahara Pengeluaran	Kegunaan aplikasi tersebut adalah untuk menunjang kelancaraan tugas bendahara pengeluaran dalam melakukan pencatatan, pembukuan dan pelaporan bendahara pengeluaran dalam melakukan transaksi keuangan Negara	

Catatan:

1. Nomor urut;
2. Jenis Aplikasi yang dimiliki baik yang berbasis online maupun yang offline seperti website, SIADPA, pustaka, antrian sidang, kearsipan dan lain-lain;
3. Bagian atau departemen dikantor yang memanfaatkan aplikasi tersebut;
4. Uraian singkat terhadap penggunaan dan kegunaan aplikasi tersebut;
5. Jika ada keterangan tambahan bahwa masih dibutuhkan tambahan alat sebanyak berapa buah untuk mendukung tupoksi.



1. Matrik Rekapitulasi Belanja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi s.d bulan ini		Sisa dana s.d bulan ini	
			Rp.	%	Rp.	%
<b>005.01.0800.401962</b>	<b>PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG</b>	<b>3.325.927.000,00</b>	<b>3.303.451.385,00</b>	<b>99,32</b>	<b>22.475.615,00</b>	<b>0,68</b>
	BELANJA PEGAWAI	2.210.099.000,00	2.202.213.362,00	99,61	8.695.638,00	0,39
005.01.WA.1066.EBA.001	Gaji dan Tunjangan	2.210.099.000,00	2.202.213.362,00	99,61	8.695.638,00	0,39
005.01.WA.1066.EBA.001.A	Pembayaran gaji dan tunjangan					
005.01.WA.1066.EBA.001.A.511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.015.232.000,00	1.014.056.820,00	99,88	1.175.180,00	0,12
005.01.WA.1066.EBA.001.A.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.000,00	15.539,00	86,33	2.461,00	13,67
005.01.WA.1066.EBA.001.A.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	64.024.000,00	63.859.394,00	99,74	164.606,00	0,26
005.01.WA.1066.EBA.001.A.511122	Belanja Tunj. Anak PNS	24.230.000,00	22.344.146,00	92,22	1.885.854,00	1,94
005.01.WA.1066.EBA.001.A.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28.640.000,00	28.140.000,00	98,25	500.000,00	1,75
005.01.WA.1066.EBA.001.A.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	763.290.000,00	762.560.000,00	99,90	730.000,00	0,10
005.01.WA.1066.EBA.001.A.511125	Belanja Tunj. PPh PNS	74.882.000,00	74.793.483,00	99,88	88.517,00	0,12
005.01.WA.1066.EBA.001.A.511126	Belanja Tunj. Beras PNS	59.405.000,00	59.311.980,00	99,84	93.020,00	0,16
005.01.WA.1066.EBA.001.A.511129	Belanja Uang Makan PNS	168.988.000,00	165.087.000,00	97,69	3.901.000,00	2,31
005.01.WA.1066.EBA.001.A.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	12.200.000,00	12.045.000,00	98,73	155.000,00	1,27
	BELANJA BARANG OPERASIONAL	924.756.000,00	905.101.855,00	97,87	19.654.145,00	0,13
005.01.WA.1066.EBA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.110.018.000,00	1.096.362.023,00	98,77	13.655.977,00	1,23
005.01.WA.1066.EBA.002.A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	439.642.000	436.643.300	99,32	2.998.700	0,68
005.01.WA.1066.EBA.002.A.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	378.468.000,00	375.491.500,00	99,21	2.994.500,00	0,79
005.01.WA.1066.EBA.002.A.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	16.280.000,00	16.280.000,00	100,00	0,00	100,00
005.01.WA.1066.EBA.002.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	44.876.000,00	44.871.800,00	99,99	4.200,00	0,01
005.01.WA.1066.EBA.002.B	LANGGANAN DAYA DAN JASA					
005.01.WA.1066.EBA.002.B.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	169.200.000,00	168.783.000,00	99,58	717.000,00	0,25
005.01.WA.1066.EBA.002.B.521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.771.000,00	1.329.400,00	75,06	441.600,00	37,05
005.01.WA.1066.EBA.002.B.522111	Belanja Langganan Listrik	21.600.000,00	20.939.019,00	96,94	660.981,00	3,06
005.01.WA.1066.EBA.002.B.522112	Belanja Langganan Telepon	1.200.000,00	676.686,00	56,39	523.314,00	43,61
005.01.WA.1066.EBA.002.B.522113	Belanja Langganan Air	12.000.000,00	10.455.500,00	87,13	1.544.500,00	87,13
005.01.WA.1066.EBA.002.B.522141	Belanja Sewa	2.500.000,00	1.180.600,00	47,22	1.319.000,00	52,78
005.01.WA.1066.EBA.002.C	PEMELIHARAAN KANTOR					
005.01.WA.1066.EBA.002.C.523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	151.950.000,00	151.940.900,00	99,99	9.100,00	0,01
005.01.WA.1066.EBA.002.C.523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	28.300.000,00	28.025.250,00	99,03	0,97	274,750
005.01.WA.1066.EBA.002.C.523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	79.935.000,00	79.555.368,00	99,53	379.632,00	0,47
005.01.WA.1066.EBA.002.D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR					
005.01.WA.1066.EBA.002.D.521115	Belanja Honor Operasional	49.800.000,00	49.800.000,00	100,00	0,00	0,00

	Satuan Kerja					
005.01.WA.1066.EBA.002.D.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	14.700.000,00	14.200.000	96,60	500.000,00	3,40
005.01.WA.1066.EBA.002.E	RAPAT KOORDINASI INTERNAL	2.320.000	2.128.000	91,72	192.000	,8,28
005.01.WA.1066.EBA.002.E.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2.320.000	2.128.000	91,72	192.000	,8,28
005.01.WA.1066.EBA.002.F	KONSULTASI KE PUSAT/ TINGKAT BANDING	76.800.000	74.455.000	96,95	2.345.000	3,05
005.01.WA.1066.EBA.002.E.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76.800.000	74.455.000	96,95	2.345.000	3,05
005.01.WA.1066.EBA.002.G	KONSULTASI KE KPPN/ KANWIL DJPB/ KPKNL	16.720.000	16.530.000	98,86	190.000	1,18
005.01.WA.1066.EAA.002.G.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.960.000,00	14.960.000,00	100,00	0,00	0
005.01.WA.1066.EBA.002.H	PENANGANAN COVID 19	2.400.000	2.400.000	100,00	0,00	0
005.01.WA.1066.EAA.002.H.524131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19	2.400.000	2.400.000	100,00	0,00	0
005.01.WA.1066.EBA.002.I	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM	38.880.000	37.320.000	95,99	1.560.000,00	4,01
005.01.WA.1066.EAA.002.I.522141	Belanja Sewa	38.880.000	37.320.000	95,99	1.560.000,00	4,01
	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	5.000.000,00	4.876.000,00	99,32	124.000,00	0,68
005.01.WA.1066.EBA	Layanan Umum (Layanan)	5.000.000,00	4.876.000,00	99,32	124.000,00	0,68
005.01.WA.1066.EBA.962	Pengelolaan Perbendaharaan	5.000.000,00	4.876.000,00	99,32	124.000,00	0,68
005.01.WA.1066.EBA.962.A	BELANJA PERALATAN DAN MESIN EKSTRAKOMTABLE					
005.01.WA.1066.EBA.962.A.521252	Belanja Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel	5.000.000,00	4.876.000,00	99,32	124.000,00	0,68

Padang Panjang, 31 Desember 2022

Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang,



ZAKIYAH ULYA, SHI

NIP. 19830420.200604.2.001

2. Matrik Rekapitulasi Belanja Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi s.d bulan ini		Sisa dana s.d bulan ini	
			Rp.	%	Rp.	%
	BELANJA MODAL	264.000.000,00	263.245.000,00	99,71	755.000,00	0,29
005.01.WA.1071.EBB	Layanan Sarana Internal (unit)	64.000.000,00	64.000.000,00	100,00	0,00	0,00
005.01.WA.1071.EBB.951	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	64.000.000,00	64.000.000,00	100,00	0,00	0,00
005.01.WA.1071.EBB.052.A.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.000.000,00	64.000.000,00	100,00	0,00	0,00
005.01.WA.1071.EBB.951	Pengadaan Fasilitas Peralatan Perkantoran	200.000.000,00	199.245.000,00	99,62	755.000,00	0,38
005.01.WA.1071.EBB.052.A.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	199.245.000,00	99,62	755.000,00	0,38



Padang Panjang, 31 Desember 2022  
Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang,

ZAKIYAH ULYA, SHI

NIP. 19830420.200604.2.001



3. Matrik Rekapitulasi Belanja Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa	
			Rp.	%	Rp.	%
005.04.0800.401963	PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG	78.250.000,00	76.150.000,00	97,32	2,68	2.100.000,00
QBA.003	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	31.350.000,00	31.350.000,00	100,00	0,00	0,00
QBA.003,051.0A. 522131	Pos Bantuan Hukum	31.350.000,00	31.350.000,00	100,00	0,00	0,00
QCA.001	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	15.400.000,00	13.450.000,00	87,34	2.100,000	12,64
QCA.001.051.0A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.120.000,00	3.100.000,00	99,36	20.000,00	0,64
QCA.001.051.0A.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.120.000	4.500.000	73,53	1.620.000	26,47
QCA.001.051.0A.524113	Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota	6.160.000	5.850.000	94,97	310.000	5,03
QCA.002	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui siding diluar gedung					
QCA.001.051.0A.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.500.000	31.350.000	99,52	150.000	0,48



Padang Panjang, 31 Desember 2022  
Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang,

*Zakiyah Ulya, SHI*  
ZAKIYAH ULYA, SHI

NIP. 19830420.200604.2.001





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

**NOMOR : W3-A8/2063/OT.01.2/12/2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022  
PADA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Agama Padang Panjang perlu dibentuk tim;  
b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Agama Padang Panjang;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;  
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;  
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022 PADA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG.**

**KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor : W3-A8/1783/OT.01.2/12/2021 tentang Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 dan Menunjuk serta mengangkat Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagaimana Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

**KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Panjang  
Pada tanggal 19 Desember 2022

KETUA,  
  
ZAKIYAH ULYA





Tembusan :  
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan  
 Agama Padang Panjang  
 Nomor : W3-A8/2063/OT.01.2/12/2022  
 Tanggal : 19 Desember 2022

**TIM PENYUSUN  
 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022  
 PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

NO	NAMA	JABATAN		KET
		DINAS	TIM	
1	2	3	4	5
1	Zakiyah Ulya, S.H.I.	Ketua	Pembina	
2	Agus Sopyan, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	Ketua	
3	Rifazul Azdmi, S.H.I.	Hakim	Koordinator	
4	Ranti Rafika Dewi, S.H.	Hakim	Koordinator	
5	Rahmat Hidayat, S.E., S.H.	Kasubbag PTIP	Sekretaris	
6	Drs. Mawardi	Panitera	Penanggung Jawab Kepaniteraan	
7	Usman, S.H.	Sekretaris	Penanggung Jawab Kesekretariatan	
8	Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.	Panmud Hukum	Anggota	
9	Nurainiwista, S.H.	Panmud Gugatan		
10	Asri, S.H.I.	Panmud Permohonan		
11	Isnaini	Kasubbag Kepegawaian Ortala		
12	Aldi Farido Utama, S.H.I.	Kasubbag Umum & Keuangan		
13	Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti		
14	Salman	Jurusita Pengganti		
15	Annisa Dwi Nidia, S.Kom	Pranata Komputer		
16	R.A. Fadillah Ariyani, A.Md.	Arsiparis Pelaksana		
17	Alfariz Maulana Reza, S.H.	CPNS		
18	Muhammad Hadiassalam, S.H.	CPNS		
19	Suci Fitrah Insani, A.Md.	CPNS		
20	Nisa Hundani Nabila, A.Md.A.B.	CPNS		
21	Muhammad Hadi, S.H.	PPNPN		
22	Rahmad Syadiki, S.H.	PPNPN		
23	Mifta Hurrizki	PPNPN		
24	Linda Elsidia, S.H.	PPNPN		
25	Hj. Yeni, S.H.I.	PPNPN		

  
 KETUA,  
  
 ZAKIYAH ULYA